

# ELEKTABILITAS DAN MITOS PEMILIH RASIONAL: DEBAT HASIL-HASIL RISET OPINI MENJELANG PEMILU 2014<sup>1</sup>

## *ELECTABILITY AND THE MYTH OF THE RATIONAL VOTERS: DEBATING POLLS FOR THE 2014 ELECTION*

**Wawan Sobari**

Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya  
Jln. Veteran Malang, Jawa Timur, Indonesia  
E-mail: wawansobari@gmail.com

Diterima: 25 Februari 2013; direvisi: 28 Maret 2013; disetujui: 4 Juni 2014

### *Abstract*

*Approaching the 2014 Election, Indonesian pollsters have been keen to release their polls presenting similar trends in party electability among the three big parties. The majority of pollsters favour the prospects of the Golkar Party for domination in the future election although large disparity concerning party electability exists across pollsters, and this has sparked serious questions. The paper critically assesses some of the underlying logic of polls by comparing them according to the poll methodology, pollsters' profile, facts of swing voters, the politics of consulting, and voters' rationality. Central to the assessment is the argument that, firstly, similarity in deploying poll methodology as well as investigation of pollsters' profiles which are not adequate to provide convincing answers on discrepancies of parties' electability. Next, scrutiny of swing voters also creates questions as large disparities in their numbers which do not reflect the central facts of nearly simultaneous polls. Critical observation leads to the argument that partisan polls constitute the root of disparity. Divisions between pollster camps are useful to explain different interests beyond polls discrepancy. As well, the paper argues that oversimplified analysis of voters' rationality have yielded misapprehensions concerning the unique characteristics of Indonesian voters. Ultimately, the dominant deployment of scientific approach (episteme and techne) in undertaking polls has overlooked contexts, values, and praxis of voters as well as the issue of power among pollsters.*

**Keywords:** *poll, electability, voting behaviour, rationality, the 2014 election*

### **Abstrak**

Menjelang Pemilu 2014, lembaga-lembaga riset opini (*pollsters*) di Indonesia antusias mempublikasikan hasil-hasil jajak pendapat (*poll*) mereka. Para *pollsters* mempresentasikan tren nilai elektabilitas yang serupa untuk tiga partai besar. Mayoritas lembaga riset opini mengunggulkan Partai Golkar sebagai parpol yang memiliki kesempatan untuk unggul dalam pemilu mendatang. Meski demikian, hasil-hasil jajak pendapat menyisakan pertanyaan serius terkait besarnya disparitas nilai-nilai elektabilitas, padahal jajak pendapat dilakukan dalam waktu yang relatif bersamaan. Makalah ini menelaah secara kritis logika fundamental riset-riset jajak pendapat melalui klarifikasi metodologi, profil lembaga, data *swing voters*, politik konsultasi, dan rasionalitas pemilih. Hasil-hasil pokok terhadap kajian ini di antaranya, pertama, telaah atas metodologi yang digunakan dan profil lembaga riset opini tidak cukup kuat memberikan jawaban yang meyakinkan terhadap perbedaan nilai-nilai elektabilitas parpol yang dipublikasikan *pollsters*. Berikutnya, kajian terhadap angka *swing voters* menyisakan pertanyaan karena disparitas

<sup>1</sup> Data-data hasil jajak pendapat atau survei opini yang digunakan dalam tulisan ini didasarkan pada publikasi yang dimuat oleh media-media *online* berbahasa Indonesia. Sebagian kecil data lainnya diunduh dari laman resmi lembaga-lembaga riset opini yang mempublikasikan datanya. Penulis kesulitan mengakses data-data hasil riset opini yang langsung berasal dari laman resmi lembaga-lembaga riset opini tersebut karena hingga awal Bulan April 2013 hanya Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mempublikasikan hasil jajak pendapat di laman resminya. Tulisan ini lebih tepat dikatakan sebagai *proxy* jawaban terhadap perbedaan elektabilitas partai-partai politik menjelang Pemilu 2014 berdasarkan hasil-hasil riset opini para *pollsters*.

angka *swing voters* yang besar tidak menjawab fakta-fakta utama penyelenggaraan jajak pendapat yang dilakukan hampir bersamaan. Kemudian, pendekatan kritis dalam melihat praktik jajak pendapat memberikan arahan untuk sampai pada argumen tentang jajak pendapat partisan sebagai inti disparitas nilai-nilai elektabilitas parpol. Selain itu, kategorisasi kubu-kubu (*camps*) di antara lembaga-lembaga riset opini berguna dalam menjelaskan perbedaan kepentingan di balik perbedaan hasil-hasil jajak pendapat. Analisis rasionalitas pemilih yang terlalu sederhana juga telah menghasilkan pemahaman yang kurang tepat terhadap karakter unik pemilih Indonesia. Terakhir, penggunaan secara dominan pendekatan sains (*episteme* dan *techne*) dalam pelaksanaan jajak pendapat telah mengabaikan konteks, nilai, realitas praksis pemilih, dan isu kontestasi di antara lembaga-lembaga riset opini.

**Kata kunci:** jajak pendapat, elektabilitas, perilaku memilih, rasionalitas, Pemilu 2014

- “JSI: Golkar Berpotensi Menangkan Pemilu 2014” ([www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), 12/08/2012)  
“Meski Baru, Partai NasDem Sudah Terkenal” ([www.nasional.inilah.com](http://www.nasional.inilah.com), 12/08/2012)  
“Survei: Perolehan Suara Demokrat Merosot Tajam di 2014” ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 14/10/2012)  
“Golkar Teratas, Demokrat dan PKS Terjun Bebas” ([www.saifulmujani.com](http://www.saifulmujani.com), 03/02/2013)  
“PAN: Parpol Populer Bisa Tidak Dipilih” ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 15/10/2012)  
“PPP: Salah Besar, Survei untuk Prediksi Hasil Pemilu 2014” ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 14/10/2012)  
“Sutan: Jangan Mati Gara-gara Survei” ([news.detik.com](http://news.detik.com), 24/03/2013)  
“PDI-P: Kami Populer Karena Konsisten” ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 16/10/2012)  
“Ical: Golkar Urutan Pertama di Semua Survei” ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 14/10/2012)

## Pendahuluan

Judul sejumlah media *online* dan laman lembaga riset opini di atas menggambarkan ekspresi dan perdebatan antara lembaga penyelenggara riset opini dan partai politik (parpol).<sup>2</sup> Partai yang merasa diunggulkan bereaksi positif dengan memberikan pernyataan yang mendukung rilis hasil survei. Sebaliknya, parpol yang tidak diunggulkan menyangkal hasil survei itu dengan berbagai alasan. Survei-survei opini mulai menjamur dan banyak diberitakan seluruh media terutama pasca-Pemilu 1999. Arus keterbukaan dan kebebasan sebagai wujud reformasi telah membuka banyak kesempatan lahir dan tumbuhnya banyak lembaga riset opini. Mereka bisa melakukan rilis hasil survei tanpa kekhawatiran adanya sensor atau larangan dari pemerintah.

Menjelang Pemilu 2004 dan 2009, eksistensi sejumlah lembaga riset opini semakin meningkat. Beberapa lembaga yang sudah mapan dan berpengalaman saling bergantian mengeluarkan hasil-hasil riset opini terkait prediksi hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden.<sup>3</sup> Apalagi setelah

beberapa individu dari mereka mendirikan lembaga riset opini baru dan hadirnya para “pemain” baru dalam arena riset opini menambah besarnya pengaruh mereka dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari arena politik nasional.<sup>4</sup> Setelah pemilihan kepala daerah secara langsung mulai dilaksanakan tahun 2005, wilayah operasi lembaga riset opini merambah arena politik lokal. Selain lembaga riset opini yang berbasis di Jakarta, di sejumlah kota besar lembaga riset opini bermunculan ikut meramaikan bursa politik lokal. Tidak pelak, lembaga-lembaga penyelenggara riset opini menjadi bagian dari perhelatan demokrasi di negeri ini.

Meskipun demikian, eksistensi lembaga riset opini tidak luput dari beberapa peristiwa menarik saat hasil survei tidak sesuai dengan fakta hasil pemilu. Dua contoh kasus menarik yang diliput banyak media massa, yaitu perbedaan prediksi hasil survei dan hasil akhir pemilihan kepala daerah (pilkada) yang terjadi dalam Pilkada DKI 2012 dan Pilkada Jawa Barat 2013. Di Jakarta, Pasangan Jokowi-Ahok secara tidak terduga memenangkan pilkada dalam dua putaran

<sup>2</sup> Jajak pendapat atau riset opini yang dimaksud dalam tulisan ini, yaitu jajak pendapat politik yang berupaya memotret perilaku politik warga menjelang pemilu dan sikap warga terhadap kebijakan pemerintah.

<sup>3</sup> Terutama Lembaga Survei Indonesia (LSI Lembaga) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI Lingkaran). LSI Lembaga adalah singkatan dari Lembaga Survei Indonesia dan LSI Lingkaran adalah singkatan dari Lingkaran Survei Indonesia. Akronim

tersebut merupakan hasil singkatan versi penulis sendiri untuk memudahkan penulisan, bukan merupakan akronim resmi dari kedua lembaga tersebut.

<sup>4</sup> Saat ini terdapat dua asosiasi lembaga riset opini di Indonesia, yaitu AROPI (Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia) pimpinan Denny J.A. dan Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) pimpinan Andrinof Chaniago.

dan menggugurkan hasil-hasil survei yang mengunggulkan pasangan *incumbent* Fauzi Bowo-Nachrowi. Sementara itu, dalam kasus Pilkada Jawa Barat 2013, pasangan Aher-Deddy yang kurang diunggulkan oleh hasil-hasil riset opini justru menang dan mengalahkan pasangan Dede Yusuf-Lex Laksamana yang difavoritkan banyak lembaga riset opini.

Kasus salah prediksi terjadi juga di Amerika Serikat meskipun negara ini sangat dikenal memiliki tradisi riset opini yang sangat kuat. Salah satu peristiwa bersejarah dalam kancah riset opini Amerika terjadi saat pemilihan Presiden Amerika tahun 1948. Pemilu saat itu menghadapkan sang petahana (*incumbent*) Harry S. Truman yang dicalonkan Partai Demokrat dan penantanginya Thomas E. Dewey yang dicalonkan Partai Republik.

Truman diprediksi oleh banyak kalangan, termasuk lembaga riset opini, akan kalah oleh Dewey. Bahkan the *Chicago Daily Tribune's* menulis *headline* "Dewey Defeats Truman" pada pagi hari menjelang pemilihan Presiden Amerika tahun 1948.<sup>5</sup> Namun, secara mengejutkan hasil survei opini itu gagal membuktikan prediksinya. Truman menang telak dengan merebut 303 dari 531 *electoral votes*. Meskipun demikian, kemenangan Truman saat itu cukup tipis bila mengacu pada perolehan suara yang mencapai 49,6% berbanding perolehan Dewey sebesar 45,1%.<sup>6</sup>

Kembali ke kasus Indonesia, perhelatan politik berikutnya yang mulai menyedot perhatian lembaga-lembaga riset opini dan publik adalah Pemilu 2014. Sejak dua tahun menjelang Pemilu 2014 digelar, setidaknya sembilan lembaga riset opini sudah merilis hasil survei atau jajak pendapat. Sejak awal tahun 2012, media massa mempublikasikan hasil-hasil riset mereka. Menariknya, setiap lembaga riset opini menampilkan hasil (angka elektabilitas) yang berbeda, walaupun mereka menyelenggarakan survei dalam rentang waktu yang relatif berdekatan.

<sup>5</sup> Penjelasan lebih lengkap bisa ditemukan dalam Jennifer Rosenberg, <http://history1900s.about.com/cs/trumanharry/a/deweytruman.htm>. diakses pada tanggal 2 April 2013.

<sup>6</sup> Selain Truman dan Dewey, dalam Pemilu kala itu Strom Thurmond menjadi calon ketiga dengan perolehan suara 2,4%.

Tiga parpol besar (PDI-P, Golkar, dan Partai Demokrat) memiliki tren yang relatif sama dalam hal peringkat elektabilitas. Namun, tidak demikian dengan angka elektabilitas masing-masing parpol yang cukup berbeda. Sebaliknya, peringkat elektabilitas parpol-parpol lainnya mengalami fluktuasi, walaupun perolehan angka elektabilitasnya relatif tidak jauh berbeda antar-lembaga riset opini.

Tabel 1 menunjukkan perbandingan hasil survei yang dilakukan sepanjang tahun 2012.<sup>7</sup> Salah satu dasar yang bisa dijadikan patokan untuk menganalisis perbedaan hasil survei itu bisa dilihat dari tren urutan elektabilitas masing-masing partai. Dengan memfokuskan pada tiga partai besar, PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, terlihat tren kenaikan yang hampir sama dari seluruh hasil survei. Golkar cenderung selalu meraih nilai elektabilitas tertinggi, disusul oleh PDI-P dan Partai Demokrat. Hanya survei LSI Lembaga dan Charta Politika yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat pada posisi kedua dalam surveinya.

Menariknya, meski hasil survei opini menunjukkan tren posisi elektabilitas yang hampir sama, namun tidak demikian dengan angka perolehan elektabilitasnya. Berdasarkan batasan waktu pelaksanaan survei, hasilnya menunjukkan nilai elektabilitas yang berbeda.<sup>8</sup> Survei opini Charta Politika dan Jaringan Survei Indonesia

<sup>7</sup> Keterbatasan penulis dalam mengakses data-data hasil riset opini yang langsung berasal dari lembaga-lembaga riset opini menyebabkan kesulitan untuk mengonfirmasi nilai total persentase elektabilitas parpol. Menurut hasil penjumlahan yang dilakukan penulis dengan data yang berasal dari media *online*, hanya hasil survei SMRC 2 yang menunjukkan akumulasi 100%, termasuk prediksi nilai *swing voters*. Sementara itu, nilai-nilai elektabilitas yang dirilis lembaga-lembaga riset opini lainnya mencapai kurang dari atau bahkan melebihi angka 100%. Khusus nilai total elektabilitas hasil survei LSI Lembaga yang melebihi 100% kemungkinan karena fleksibilitas penggunaan konsep *swing voters* yang digunakan untuk mengidentifikasi jawaban responden. Karena keterbatasan ini maka analisis yang disajikan penulis lebih difokuskan pada perbedaan-perbedaan nilai elektabilitas Partai Golkar, PDI-P, dan Partai Demokrat yang mayoritas menempati posisi tiga besar dari seluruh hasil-riset opini tersebut.

<sup>8</sup> Berdasarkan data yang dimiliki penulis, jarak perbedaan waktu pelaksanaan survei antarlembaga riset opini antara kurang dari satu bulan hingga empat bulan. Namun, jarak waktu antara pelaksanaan survei dan rilis hasil survei dari semua lembaga relatif sama, yaitu dalam rentang waktu dua minggu. Kecuali survei SMRC 2 yang dirilis lebih lama dari pelaksanaan surveinya, yaitu lebih dari dua bulan sejak pelaksanaan survei.

**Tabel 1.** Perbandingan Hasil Riset Opini Elektabilitas Partai Politik Februari–Desember 2012 (%)

No.	Parpol	Lembaga Riset Opini					
		LSI Lembaga*	Charta Politika**	JSI***	SMRC 1****	LSI Lingkaran*****	SMRC 2*****
1.	P. Nasdem		4,3		4	5	5,2
2.	PKB	4,6		5,4	3		5,6
3.	PKS	3,7			3		2,7
4.							
5.	P. Golkar	15,5	18	17,4	14	21	21,3
6.	P. Gerindra	4,9	4,7	5,6	3	5,2	7,2
7.							
8.	PAN	4,1		6	2		1,5
9.	PPP	4,9			3		4,1
10.	P. Hanura	1,2			0,5		1,4
11.	PBB						3,1
12.	PKPI						
	Belum tahu	51	34,4	26,7	23	TK	21,4
<b>Waktu Survei</b>		<b>1–12 Feb 2012</b>	<b>8–22 Jul 2012</b>	<b>17–21 Jul 2012</b>	<b>5–16 Sep 2012</b>	<b>1–8 Okt 2012</b>	<b>6–20 Des 2012</b>

**Keterangan:** TK= tanpa keterangan

\* Ira Guslina, “LSI: Pemilu Sekarang, Suara Demokrat Anjlok”, <http://www.tempo.co/read/news/2012/02/19/078384978/LSI-Pemilu-Sekarang-Suara-Demokrat-Anjlok> diakses pada 30 Maret 2013

\*\* Eko Huda dan Nila Chrisna Yulika, “Survei Charta Politika: Golput Masih Nomor Satu”, <http://us.politik.news.viva.co.id/news/read/347596-survei-charta-politika--golput-masih-nomor-satu> diakses pada 30 Maret 2013

\*\*\* Ruslan Burhani, “JSI: Golkar Berpeluang Menangkan Pemilu 2014”, <http://www.antaraneews.com/berita/327161/jsi-golkar-berpotensi-menangkan-pemilu-2014> diakses pada 30 Maret 2013

\*\*\*\* Icha Rastika, “Survei: Perolehan Suara Demokrat Merosot Tajam di 2014”, [http://nasional.kompas.com/read/2012/10/14/17435834/Survei.Perolehan.Suara.Demokrat.Merosot.Tajam.di.2014?utm\\_source=WP&utm\\_medium=Ktpidx&utm\\_campaign=](http://nasional.kompas.com/read/2012/10/14/17435834/Survei.Perolehan.Suara.Demokrat.Merosot.Tajam.di.2014?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=) diakses pada 30 Maret 2013

\*\*\*\*\* Lingkaran Survei Indonesia, “Makin Suramnya Partai dan Capres Islam di Pemilu 2014”, <http://lsi.co.id/lsi/2012/10/14/makin-suramnya-partai-capres-islam-di-pemilu-2014/> diakses pada 30 Maret 2013

\*\*\*\*\* Saiful Mujani, “Gokar teratas, Demokrat dan PKS Terjun Bebas”, <http://www.saifulmujani.com/blog/2013/02/04/golkar-teratas-demokrat-dan-pks-terjun-bebas> diakses pada 30 Maret 2013

(JSI) yang dilakukan hampir bersamaan pada bulan Juli 2012 hasilnya menunjukkan selisih antara 0,6 hingga 2,7% antara PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Dua bulan kemudian (September), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan kecenderungan penurunan untuk tiga parpol besar tersebut. Bila dibandingkan dengan hasil survei JSI dua bulan sebelumnya (Juli), nilai elektabilitas Partai Demokrat mengalami penurunan paling tajam hingga 5,1%, kemudian disusul nilai elektabilitas PDI-P dan Partai Golkar yang masing-masing turun sebesar 4,5% dan 3,4%.

Sebulan kemudian (Oktober), LSI Lingkaran menyelenggarakan survei yang sama. Menariknya, nilai elektabilitas ketiga parpol besar itu mengalami lonjakan cukup tinggi bila dibandingkan dengan hasil survei SMRC pada bulan September 2012. PDI-P mengalami ke-

naikan tertinggi sebesar 8,2%, kemudian diikuti nilai elektabilitas Partai Golkar yang naik sebesar 7% dan Partai Demokrat yang naik 6%. Pada akhir tahun 2012, SMRC kembali melaksanakan survei yang sama. PDI-P dan Partai Golkar mengalami kenaikan nilai elektabilitas cukup tinggi masing-masing sebesar 9,2% dan 7,3%. Partai Demokrat mengalami kenaikan nilai elektabilitas hanya sebesar 0,3%. Namun, bila hasil survei SMRC (Desember) dibandingkan dengan hasil survei LSI Lingkaran yang dilakukan dua bulan sebelumnya (Oktober), di antara tiga parpol besar itu hanya nilai elektabilitas Partai Demokrat yang mengalami penurunan hingga 5,7%, sedangkan nilai elektabilitas PDI-P dan Partai Golkar meningkat.

Atas dasar tren tersebut bisa diketahui pula perbedaan nilai elektabilitas dengan melihat perbedaan rentang waktu survei. Nilai elektabilitas

**Tabel 2.** Perbandingan Hasil Riset Opini Elektabilitas Partai Politik Januari–Maret 2013 (%)

No.	Parpol	Lembaga Riset Opini		
		LSJ*	Publica RC**	LSN***
1.	P. Nasdem	4,5	2,5	5,3
2.	PKB	1,8	0,4	4,1
3.	PKS	2,6	1,7	4,6
4.				
5.	P. Golkar	18,5	4,2	19,2
6.	P. Gerindra	10,3	6	11,9
7.				
8.	PAN	2,5	1,6	4,1
9.	PPP	2,4	0,6	3,4
10.	P. Hanura	5,8	0,6	6,2
11.	PBB			0,4
12.	PKPI			0,2
	Belum tahu	TK	59,7	TK
<b>Waktu Survei</b>		<b>9–15 Feb 2013</b>	<b>18–21 Feb 2013</b>	<b>26 Feb–15 Mar 2013</b>

Keterangan: TK = tanpa keterangan

\* Liputan 6, “Survei LSJ: Demokrat dan PKS Melorot Jelang Pemilu 2014”, <http://news.liputan6.com/read/515992/survei-lsj-demokrat-dan-pks-melorot-jelang-pemilu-2014> diakses pada 30 Maret 2013

\*\* JPNN, “Mayoritas Kelas Menengah Belum Punya Pilihan”, <http://www.jpnn.com/read/2013/03/21/163655/Mayoritas-Kelas-Menengah-Belum-Punya-Parpol-Pilihan> diakses pada 30 Maret 2013. Responden survei Publica Research and Consulting secara khusus ditujukan pada kelas menengah. Lembaga riset opini ini tidak menjelaskan kriteria kelas menengah yang dimaksud dalam rilis hasil risetnya. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap media-media online (*jpnn.com*, *solopos.com*, *suaramerdeka.com*, *vivanews.co.id*, dan *kompas.com*) yang mempublikasikan hasil riset opini tersebut hanya menyebut bahwa respondennya bertempat tinggal di perkotaan (kelas menengah urban). Jumlah sampel sebanyak 1.300 orang dari 33 ibu kota provinsi di Indonesia. Responden dipilih berdasarkan buku telepon yang diterbitkan oleh PT Telkom dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara telepon. Pemilihan nomor telepon rumah tangga ditentukan secara acak sistematis dan penentuan responden dilakukan secara acak murni. *Margin of error* ditetapkan sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Uraian metodologi jajak pendapat Publica Research and Consulting ini bisa dilihat dalam Arif Bambang Amri dan Syahrul Ansyari, “Survei Publica: Kelas Menengah Tak Percaya Partai”, <http://us.politik.news.viva.co.id/news/read/398909-survei-publica--kelas-menengah-tak-percaya-partai> diakses pada 30 Maret 2013.

\*\*\* Salmah Muslimah, “LSN Sebut PD Anjlok di 2014, Sutan: Jangan Mati Gara-gara Survei”, <http://news.detik.com/read/2013/03/24/163525/2202219/10/lsn-sebut-pd-anjlok-di-pemilu-2014-sutan-jangan-mati-gara-gara-survei> diakses pada 30 Maret 2013

Partai Demokrat menurut hasil survei LSI Lembaga sebesar 13,7% pada bulan Februari 2012. Delapan bulan kemudian, temuan hasil survei LSI Lingkaran menunjukkan nilai elektabilitas yang meningkat hingga mencapai 14%. Padahal dalam rentang waktu tersebut, media memberikan porsi ekspos yang besar terhadap skandal korupsi yang dilakukan para petinggi Partai Demokrat.<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang waktu itu melibatkan para petinggi Partai Demokrat, yaitu tindak pidana korupsi Pembangunan Wisma Atlet, tindak pidana korupsi pembangunan *Sport Center* Hambalang, dan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan laboratorium di beberapa perguruan tinggi negeri. Beberapa Politisi Partai Demokrat yang terbukti dan disangka terlibat, yaitu Nazarudin (Bendahara Umum), Angelina Sondakh (Wakil Sekretaris Umum), Andi Alfian Mallarangeng (Mantan Menpora), dan Anas Urbaningrum (Ketua Umum). Dalam presentasi bertajuk hasil survei “Kinerja Pemerintah dan Dukungan pada Partai: Tren Anomali Politik 2012–2013”, SMRC menyebutkan salah satu kesimpulannya bahwa “Meskipun belum tentu bersalah secara pidana, hukum politik (opini publik) pada Demokrat

Contoh perbedaan mencolok lainnya diketahui dari perbandingan hasil survei LSI Lembaga dan SMRC atas elektabilitas Partai Golkar. Pada bulan Februari 2012, LSI Lembaga menyebutkan elektabilitas Partai Golkar sebesar 15,5%. Tujuh bulan kemudian (September) nilai elektabilitas tersebut menurun 1,5% hingga menjadi 14%. Berbeda dengan LSI dan SMRC, hasil survei Charta Politika dan JSI menunjukkan peningkatan elektabilitas Partai Golkar.

Menarik pula mencermati nilai elektabilitas Partai Golkar berdasarkan hasil survei LSI Lingkaran dan SMRC yang menunjukkan per-

dan kader-kadernya telah dijatuhkan sehingga partai ini mengalami penurunan kepercayaan dan dukungan dari pemilih secara drastis”. Presentasi itu didasarkan pada hasil survei nasional SMRC yang dilakukan 6 hingga 20 Desember 2012. Dengan kata lain, menurut SMRC penurunan nilai elektabilitas Partai Demokrat disebabkan oleh kasus korupsi yang dilakukan para petinggi Partainya.

bedaan mencolok. Survei yang dilakukan dalam perbedaan rentang waktu kurang dari dua bulan menunjukkan selisih nilai elektabilitas yang cukup besar. Menurut hasil survei LSI Lingkaran, elektabilitas Partai Golkar mencapai 21%. SMRC menyampaikan bahwa nilai elektabilitas Partai Golkar mencapai 14%.<sup>10</sup>

Hasil survei elektabilitas parpol yang dilakukan dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2013 pun menunjukkan perbedaan, walau relatif lebih kecil. Menurut hasil survei nasional Lembaga Survei Jakarta (LSJ) pada Februari 2013, nilai elektabilitas PDI-P mencapai 16,5%. Kurang dari satu bulan kemudian, LSN melakukan survei yang sama dan menemukan nilai elektabilitas PDI-P yang lebih besar hingga mencapai 20,5%. Begitupun nilai elektabilitas Partai Golkar yang meningkat 0,7%. Menariknya, hasil survei LSN menunjukkan penurunan nilai elektabilitas Partai Demokrat sebesar 2,6% bila dibandingkan dengan temuan survei LSJ yang dilakukan kurang dari satu bulan sebelumnya. Selain itu, berdasarkan hasil survei Lembaga Survei nasional (LSN), PDI-P merupakan parpol yang memiliki nilai elektabilitas tertinggi dibanding Partai Golkar dan Partai Demokrat. Temuan survei LSN itu berbeda dengan tren temuan lembaga-lembaga riset opini lainnya sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 1 yang menunjukkan nilai elektabilitas Partai Golkar selalu berada pada posisi tertinggi dibanding nilai elektabilitas PDI-P dan Partai Demokrat.

Mencermati perbandingan hasil-hasil survei elektabilitas parpol yang dilakukan pada tahun 2012 dan tahun 2013 terdapat satu kecenderungan menarik. Selisih angka elektabilitas tiga partai besar tersebut mengalami penurunan. Dengan kata lain, semakin mendekati Pemilu maka perbedaan selisih elektabilitas masing-masing parpol mengalami penurunan. Hal itu bisa diduga karena sosialisasi pemilu terus mengalami perbaikan dan parpol-parpol lain di luar tiga parpol besar telah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, asumsi itu tidak tepat bila melihat secara komprehensif hasil-hasil survei tersebut, terutama melihat perbandingan seberapa besar responden yang menjawab “belum

<sup>10</sup> Hasil riset opini kedua lembaga tersebut dirilis dalam waktu yang sama pada 14 Oktober 2012.

menetapkan pilihan” (*swing voter*) saat survei dilakukan.

Untuk mencari jawaban mengenai perbedaan nilai elektabilitas partai politik seperti dirilis sembilan lembaga riset opini tersebut tidak sederhana karena pengaruh waktu pelaksanaan survei yang semakin mendekati penyelenggaraan Pemilu 2014. Untuk mendeteksi penyebab perbedaan tersebut, beberapa pertanyaan mesti diajukan terlebih dahulu. Pertanyaan utamanya, mengapa survei yang diadakan dalam waktu hampir bersamaan menghasilkan perbedaan nilai elektabilitas yang cukup tinggi? Pertanyaan lebih spesifik, apakah terdapat perbedaan metodologi survei yang diterapkan lembaga-lembaga riset opini itu? Bagaimana keterkaitan perbedaan hasil survei dengan profil lembaga-lembaga riset opini? Apakah perbedaan itu disebabkan oleh potensi *swing voters*? Apakah ada kemungkinan politik riset opini di balik rilis hasil-hasil survei itu? Bagaimana penjelasan yang didasarkan pada asumsi rasionalitas pemilih?

### Penggunaan Metodologi Riset Opini

Untuk menjawab perbedaan hasil-hasil survei mengenai nilai elektabilitas parpol menjelang Pemilu 2014 yang dipublikasikan beberapa lembaga riset opini maka upaya pertama dilakukan dengan melakukan klarifikasi terhadap penggunaan metodologi riset. Asumsinya, perbedaan metodologi yang digunakan akan sangat memungkinkan munculnya perbedaan hasil riset. Untuk itu, penulis melakukan perbandingan metodologi riset opini yang diaplikasikan tujuh lembaga riset opini.<sup>11</sup> Tabel 3 merangkum hasil perbandingan tersebut.

Tidak ada perbedaan mendasar terhadap metodologi riset yang digunakan oleh lembaga-lembaga riset opini tersebut. Seluruhnya bersandar pada perspektif positivisme. Mereka memprediksi elektabilitas partai politik berdasarkan pemahaman preferensi pemilih menggunakan pendekatan sains (ilmu pengetahuan alam).<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Penulis tidak memasukkan lembaga riset Publika Research and Consulting karena tidak tersedia cukup data dari laman resmi lembaga tersebut.

<sup>12</sup> Kamus Bahasa Indonesia menerjemahkan kata sains sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya; ilmu pengetahuan alam. Lihat D. Sugono dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm. 1.341.

**Tabel 3.** Perbandingan Metodologi Riset Opini antar-Lembaga Riset\*

Lembaga Riset Opini	Metodologi Survei					
	Teknik Sampling	Tingkat Kepercayaan	Margin of Error	$\Sigma$ Sampel	Populasi	Teknik Pengumpulan Data
LSI Lembaga	Sistem pengacakan bertingkat	95%	$\pm 2,2\%$	2.050	33 provinsi, 17 tahun/ menikah	Wawancara tatap muka
LSI Lingkaran	Sistem pengacakan bertingkat	95%	$\pm 2,9\%$	1.200	33 provinsi, 17 tahun/ menikah	Wawancara tatap muka, FGD, <i>in-depth interview</i>
LSN	Rambang berjenjang dan proporsional	95%	$\pm 2,8\%$	1.230	33 provinsi, 17 tahun/ menikah	Wawancara tatap muka, <i>in-depth interview</i> , analisis media
SMRC	Sistem pengacakan bertingkat	95%	$\pm 3\%$	1.220	33 provinsi, 17 tahun/ menikah	Wawancara tatap muka
JSI	Sistem pengacakan bertingkat	95%	$\pm 2,9\%$	1.200	33 provinsi, 17 tahun/ menikah	Wawancara tatap muka
LSI	<i>Tidak disebutkan</i>	95%	$\pm 2,8\%$	1.225	33 provinsi, 17 tahun atau menikah	wawancara kuisisioner
Charta Politika	Sistem pengacakan bertingkat	95%	$\pm 2,19\%$	2.000	33 provinsi, 17 tahun/ menikah	Wawancara tatap muka

\*Seluruh data tentang metodologi merujuk pada rilis media yang disampaikan pada saat lembaga riset opini melakukan ekspos temuan riset. Penulis mengutipnya dari pemberitaan media *online* yang mempublikasikan hasil riset-riset tersebut. Hanya LSI Lembaga dan SMRC yang membuka akses secara terbuka terhadap presentasi lengkap dari rilis hasil survei yang telah dilakukan, termasuk penjelasan metodologinya.

Perilaku memilih yang merupakan fenomena politik (sosial) berusaha didekati dengan pendekatan sains.

Tidak adanya perbedaan mendasar dalam penggunaan metodologi riset yang dimaksud terkait dengan asumsi-asumsi filosofis yang digunakan lembaga riset opini dalam risetnya. Pertama terkait penggunaan logika deduktif dalam menjelaskan perilaku pemilih. Penetapan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis telah ditetapkan sejak awal, kemudian digunakan untuk mengonfirmasi temuan atau perilaku pemilih. Misalnya, SMRC merujuk karya Anthony Downs (1957) dan model ekonomi politik perilaku pemilih sebelum melakukan survei untuk mengetahui korelasi antara kinerja pemerintah dan dukungan pada partai. Kedua tentang bagaimana pandangan peneliti terhadap realitas perilaku politik pemilih (*the nature of reality*). Penggunaan cara-cara berpikir linear dalam menjelaskan faktor-faktor penjas yang ditentukan sebelumnya digunakan untuk

melakukan generalisasi tentang hal-hal yang mendorong pilihan pemilih. Penggunaan uji korelasi antarvariabel (pengubah dan yang diubah) merupakan bentuk determinasi metodologi riset sains. Meskipun dalam praktiknya fakta sosial dan politik di luar diri pemilih sebenarnya lebih kompleks dan tidak seluruhnya tepat dijelaskan dengan cara berpikir linier.

Ketiga penggunaan teknik dan prosedur analisis (kuantitatif) yang membutuhkan keahlian tertentu untuk mengaplikasikannya tidak memberi ruang bagi keterlibatan responden dalam melakukan analisis data. Asumsi bahwa peneliti sebagai profesional yang paling berhak dan mampu melakukan analisis data hasil riset merupakan bagian dari filosofi riset-riset sains. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam metodologi seperti penggunaan teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam pendekatan kualitatif. Contoh, LSI Lingkaran dan LSN menggunakan teknik tambahan berupa diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara

mendalam, dan analisis media. Tujuannya lebih sebagai instrumen untuk membantu analisis.<sup>13</sup> Penggunaan teknik-teknik kualitatif tersebut tetap tidak mengubah asumsi dasar bahwa peneliti sudah menetapkan desain kerangka berpikir sejak awal berdasarkan teori tertentu untuk menggeneralisasi temuan.<sup>14</sup>

Penjelasan lebih lanjut, penggunaan ukuran-ukuran sampel, tingkat kepercayaan, simpangan kesalahan (*margin of error*), dan pengujian-pengujian inferensial keterhubungan antarvariabel riset menunjukkan prinsip-prinsip positivisme. Informasi opini yang berasal dari persepsi responden yang dipilih secara random diolah secara logis dan matematis untuk memenuhi standar metodologis sebagai pengetahuan yang teruji. Intinya, cara-cara yang digunakan serupa dengan perlakuan terhadap objek riset ilmu alam (*natural science*).

Demikian pula, terkait ukuran sampel, simpangan kesalahan, dan tingkat kepercayaan dalam melakukan survei seluruhnya menggunakan asumsi yang sama. Perbedaan jumlah sampel merupakan konsekuensi asumsi semakin rendahnya simpangan kesalahan atau ekspresi jumlah kesalahan sampel acak (*random sampling error*) dalam survei. Namun faktanya, semakin rendah simpangan baku tidak menjamin semakin rendahnya perbedaan nilai-nilai elektabilitas tiga parpol besar. Kembali ke Tabel 1, survei opini nasional Charta Politika (Juli 2012) yang menetapkan simpangan kesalahan sebesar  $\pm 2,19\%$  dan jumlah responden 2.000 orang menunjukkan

perbandingan yang menarik dengan hasil survei LSI Lingkaran yang menetapkan simpangan kesalahan  $\pm 2,9\%$  dan jumlah sampel 1.200 orang yang dilakukan kurang dari tiga bulan kemudian (Oktober 2012). Di tengah tren penurunan nilai elektabilitas Partai Demokrat menurut hasil-hasil survei lembaga riset opini lain dalam Tabel 1, LSI Lingkaran justru menyebutkan nilai elektabilitas Partai Demokrat sebesar 14% yang lebih besar dari temuan nilai elektabilitas sebesar 12,5% dari Charta Politika yang dilaksanakan kurang dari tiga bulan sebelumnya. Menarik pula melihat perbandingan hasil survei Charta Politika dan JSI yang dilakukan hampir bersamaan pada bulan Juli 2012. JSI yang menetapkan simpangan kesalahan dan jumlah sampel lebih kecil ( $\pm 2,9\%/1.200$  orang) dari Charta Politika, menyebutkan nilai elektabilitas PDI-P lebih besar sebanyak 2,7% daripada temuan Charta Politika (13,5% berbanding 10,8%).

Mengenai kemungkinan *non-sampling error*, yang disebabkan oleh kesalahan manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja, cukup sulit untuk mengetahui atau melakukan *proxy* jawabannya. Penulis menyadari kelemahan tersebut karena tidak melakukan konfirmasi langsung kepada para penyelenggara riset-riset opini tersebut. Pentingnya ketepatan penarikan sampel dalam survei ditekankan oleh salah satu pegiat riset opini yang cukup dikenal, Burhanuddin Muhtadi. Peneliti Senior LSI Lembaga itu pernah menulis di *Harian Jurnal Nasional* edisi 1 Juli 2009 mengenai kesahihan hasil survei. Menurut Burhanuddin, kemungkinan *sampling* yang bermasalah bisa menyebabkan rendahnya akurasi dan presisi hasil survei, terutama menyangkut nilai keberpeluangan setiap individu yang ditetapkan untuk terpilih dalam penetapan dan penarikan sampel.<sup>15</sup> Kembali ke Tabel 3, kesamaan teknik *sampling* antara JSI, Charta Politika, dan LSI Lingkaran ternyata tidak menunjukkan logika kesesuaian nilai-nilai elektabilitas parpol sebagaimana disampaikan sebelumnya. Sekali lagi, konfirmasi langsung terhadap penyelenggara survei memang mesti dilakukan untuk memperdalam kemungkinan *non-sampling error*.

<sup>13</sup> Lihat rilis LSI Lingkaran berjudul "Makin Suramnya Partai & Capres Islam di Pemilu 2014", <http://lsi.co.id/lsi/2012/10/14/makin-suramnya-partai-capres-islam-di-pemilu-2014/> diakses pada tanggal 30 Maret 2013. Penulis menyadari keterbatasan analisis perbandingan metodologi yang digunakan lembaga-lembaga riset opini. Penyebabnya, publikasi media terhadap hasil survei mereka tidak menyebutkan secara detail penggunaan metodologinya, termasuk penggunaan teknik-teknik pengumpulan data seperti FGD dan wawancara mendalam. Hanya LSI Lingkaran yang menjelaskan sedikit mengenai tujuan penggunaan FGD dan wawancara mendalam: "Untuk mendalami substansi dan analisis, LSI juga melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *in-depth interview*".

<sup>14</sup> Tiga poin yang penulis uraikan dalam menilai metodologi tersebut diadopsi dari John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2009), hlm. 16–19. dan R. Chambers, *Whose Reality Counts? Putting the First Last*, (London: Intermediate Technology Publications, 1997), hlm. 31–32.

<sup>15</sup> Burhanuddin Muhtadi, "Survei Dapatkah Dipercaya?", <http://www.lsi.or.id/liputan/379/Survei-dapatkah-dipercaya>, diakses pada 30 Maret 2013.

Di luar pertimbangan *non-sampling error*, penulis tetap memandang tidak ada perbedaan mendasar dalam penggunaan metodologi riset yang dilakukan lembaga-lembaga riset opini tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil survei elektabilitas parpol menjelang Pemilu 2014 bukan disebabkan oleh perbedaan metodologi riset. Keseragaman metodologi yang digunakan dalam survei oleh lembaga-lembaga riset opini justru memunculkan pertanyaan mengapa terdapat perbedaan hasil-hasil survei yang dilakukan lembaga-lembaga itu, padahal seluruh lembaga riset opini menjalankan metodologi yang seragam?

### Profil Lembaga Penyelenggara Riset Opini

Upaya mencari jawaban berikutnya melalui pendalaman profil lembaga-lembaga riset opini. Untuk itu, penulis melakukan penelusuran secara *online* terhadap laman-laman resmi lembaga riset opini tersebut. Penulis berhasil mengumpulkan data dari tujuh laman resmi yang bisa diakses secara bebas. Tidak semua lembaga riset opini menyediakan data dan mempublikasikan profilnya dengan lengkap, terutama terkait bentuk lembaga. Hanya LSI Lembaga yang cukup lengkap menyajikan profil institusi di laman resminya. Untuk jajaran pengurus yang mengelola organisasi, hanya Charta Politika yang tidak mencantumkan dalam laman resminya.

Merujuk pada tahun berdirinya, lembaga-lembaga riset opini tersebut relatif masih baru.<sup>16</sup> Hanya LSI Lembaga yang berusia menjelang sepuluh tahun yang berdiri secara resmi sejak 17 September 2003. Berdasarkan identitas yang dicantumkan dalam laman resminya, para *pollsters* mengklaim sebagai lembaga yang independen dan profesional dalam riset opini dan konsultasi politik. Hanya LSI Lembaga yang berani menyebutkan sebagai lembaga yang berorientasi bukan pada pencarian profit atau akumulasi modal dalam menjalankan aktivitas riset opininya, sedangkan yang lain tidak secara tegas menyebutkannya.

<sup>16</sup> Lembaga sejenis yang telah lama berdiri dan melaksanakan riset opini, yaitu LP3ES Jakarta. Hanya saja, penulis tidak memasukkan dalam makalah ini karena LP3ES tidak mempublikasikan hasil-hasil riset opini terkait Pemilu 2014 selama 2012 hingga Maret 2013.

JSI secara jelas menyebutkan identitasnya sebagai PT (perseroan terbatas) Jaringan Suara Indonesia yang menunjukkan identitas badan usaha. Sementara itu, yang lain menyebutkan identitas bentuk lembaganya sebagai badan hukum yayasan. Dalam hukum positif Indonesia, yayasan dikenal sebagai lembaga yang bermotif sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, bukan untuk mencari keuntungan dan memupuk modal.

Berdasarkan jasa pelayanan yang diberikan lembaga, seluruhnya menyediakan jasa riset opini, khususnya yang terkait dengan kontestasi pemilu nasional dan pemilu lokal (pilkada). Tiga dari tujuh lembaga (LSI Lingkaran, SMRC, dan JSI) secara eksplisit menyebutkan jasa konsultasi pemenangan pemilu. Hanya Charta Politika yang secara eksplisit menyebut lembaganya sebagai pusat data politik. Selain riset opini terkait kontestasi politik, LSI Lembaga dan LSJ melayani pula riset-riset komersial untuk perusahaan-perusahaan.<sup>17</sup> Namun, menurut Muhammad Qodari, salah seorang pegiat riset opini dan konsultan politik, organisasi-organisasi konsultan politik di Indonesia merupakan generalis. Artinya, mereka melakukan semua pekerjaan, termasuk menjalankan seluruh pekerjaan yang terkait dengan kampanye kandidat yang menggunakan jasanya.<sup>18</sup>

Melihat data pengurus inti dari lembaga-lembaga riset opini tersebut, mayoritas berlatar belakang akademisi, peneliti, dan konsultan politik. Misalnya, pengurus LSI Lembaga Kuskrido Ambardi berlatar belakang akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Hendro Prasetyo dan Burhanuddin Muhtadi berlatar belakang akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah, Direktur Eksekutif LSI Lingkaran Denny J.A. merupakan ahli politik (*political expert*), mantan pegiat Charta Politika Bima Arya Sugiarto sebelumnya merupakan akademisi sebelum menjadi

<sup>17</sup> Menurut Muhammad Qodari, LSI Lingkaran merupakan lembaga riset opini pertama di Indonesia yang memosisikan dirinya sebagai konsultan politik. Lihat M. Qodari, "The Professionalization of Politics: The Growing Role of Polling Organization and Political Consultants", dalam E. Aspinnal dan M. Mietzner (Eds.), *Problems of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, (Singapore: ISEAS Publishing, 2010), hlm. 131.

<sup>18</sup> *Ibid* hlm. 137. Dalam pandangan penulis, lembaga konsultan politik memiliki keterkaitan erat atau bahkan menjadi satu dengan lembaga riset opini karena konsultasi politik biasanya diawali dengan kegiatan riset opini.

**Tabel 4.** Profil Singkat Lembaga-Lembaga Riset Opini Berskala Nasional

Lembaga Riset Opini	Profil				
	Tahun berdiri	Identitas	Pengurus	Bentuk Lembaga	Pelayanan
<b>LSI Lembaga</b>	17 September 2003	LSI bersifat independen, nonpartisan, nirlaba, tidak berafiliasi pada partai politik maupun tokoh atau kelompok.	Direktur Eksekutif: Kuskrido Ambardi Direktur Riset: Hendro Prasetyo Direktur Komunikasi Publik: Burhanuddin Muhtadi	Badan hukum yayasan	LSI menyediakan jasa riset bagi berbagai kalangan yang berkepentingan dengan opini publik. LSI melakukan 2 jenis survei: 1) Survei publik 2) Survei komersial Omnibus: menitipkan pertanyaan dalam kuesioner survei.
<b>LSI Lingkaran</b>	2005	Pembuat opini publik, peneliti, kolumnis, ahli survei.	Denny J.A, Ph.D.	Tidak disebutkan dengan jelas, memiliki 5 anak perusahaan.	Survei/riset, konsultan bagi kepala daerah, partai, pemimpin lembaga pemerintahan dan BUMN, calon pejabat publik yang bertarung dalam pemilu, dan kelompok bisnis.
<b>LSN</b>	17 Juli 2006	Lembaga riset opini independen dan profesional	Direktur Eksekutif: Umar S. Bakry Manajer SDM: A.A. Djarkasih Manajer Riset: Denny Ramdhany	Badan hukum yayasan	Survei, terutama survei-survei elektoral (tidak disebutkan dengan jelas dalam laman resmi LSN).
<b>SMRC</b>	Tidak disebutkan	Konsultan politik	Saiful Mujani (Founder) Grace Natalie (CEO)	Tidak disebutkan dengan jelas	Jasa konsultan politik yang terintegrasi (jasa penelitian, survei daerah pemilihan, survei <i>tracking</i> , studi kualitatif, FGD, pendampingan politik, <i>quick count</i> pemilu).
<b>JSI</b>	8 Agustus 2008	Lembaga konsultan politik	Widdi Aswindi, Nukie Basuki, Eka Kusmayadi, Fajar S. Tamin, dan Popon Lingga Geni	Perseroan terbatas	Survei opini publik Survei kebijakan publik. <i>Quick Count</i> Pendampingan kemenangan (konsultan)
<b>LSJ</b>	22 Juni 2009	Lembaga riset independen, baik yang tidak berafiliasi dengan partai maupun organisasi politik	Direktur: Rendy Kurnia Manajer Operasional: Igor Dirgantara Manajer SDM: Dedy Setiadi Manajer Statistik: Sakti Hermansyah	Badan hukum yayasan	Survei opini publik (survei pilkada dan survei nasional tentang partai politik dan calon presiden). Survei kebijakan publik (pemda dan kementerian negara) Survei <i>corporate</i>
<b>Charta Politika</b>	Maret 2008	Pusat data dan penelitian politik	Tidak disebutkan dengan jelas	Tidak disebutkan dengan jelas	Produk riset dan analisis Charta Politika Indonesia

Sumber: <http://lembagasurveijakarta.com/>; <http://www.jsi-ri-set.com/>; <http://www.saifulmujani.com/>; <http://www.lsi.or.id/program/>; <http://lsn07.com/>; <http://chartapolitika.com/>; <http://lsinetwork.co.id/>. Seluruh data diakses pada 2 April 2013.

fungsionaris Partai Amanat Nasional (PAN).<sup>19</sup> Sementara itu, para pegiat JSI mengklaim sebagai sekumpulan profesional konsultan politik.<sup>20</sup> Direktur Eksekutif LSN Umar S. Bakry pun mengklaim sebagai periset.<sup>21</sup> Begitupun LSJ didirikan oleh beberapa akademisi di Jakarta.<sup>22</sup> Tidak terdeteksi secara terbuka bahwa individu-individu tersebut berafiliasi atau berpatron dengan partai politik.

Muhammad Qodari mengelompokkan tiga kategori latar belakang konsultan politik di Indonesia, yaitu *political experts* (ahli politik), *academics* (akademisi), dan *advertising and public relations professionals* (praktisi iklan dan hubungan masyarakat). Kategori ini dimaksudkan untuk membandingkan dengan kepengurusan lembaga-lembaga riset opini di Amerika yang memiliki latar belakang sebagai bagian dari partai politik. Menurut Qodari, lembaga konsultan politik (bukan hanya lembaga riset opini) mayoritas dipegang oleh orang-orang yang independen dan tidak berafiliasi pada partai politik.<sup>23</sup> Catatan kritis penulis, meski mengklaim sebagai lembaga yang independen dan tidak berafiliasi pada kekuatan politik tertentu, tidak menutup kemungkinan dilakukannya praktik *maladjustment* terhadap hasil-hasil survei untuk kepentingan klien. Dengan kata lain, meskipun lembaga penyelenggara riset opini dan konsultan politik mengklaim dirinya sebagai nonpartisan, namun cukup sulit memberikan jaminan bahwa hasil-hasil riset opininya tidak bersifat partisan (*maladjustment*).

Apabila ditelusuri antar-individu pengurus lembaga-lembaga riset opini ternyata memiliki keterkaitan hubungan kerja sama sebelumnya. Individu-individu pengurus tersebut sebelumnya memiliki hubungan dengan LSI Lembaga dan LSI Lingkaran, baik sebagai peneliti, kolega, maupun ahli yang berkecimpung di dua lembaga

itu. Mohammad Qodari, sebagai pegiat riset opini dan konsultan politik, menyebutkan bahwa dirinya pernah bergabung dengan LSI Lembaga dan LSI Lingkaran. Demikian pula Denny J.A., Direktur Eksekutif LSI Lingkaran, dulunya merupakan bagian dari LSI Lembaga sebelum mendirikan LSI Lingkaran.<sup>24</sup> Sementara itu, Umar S. Bakri Direktur Eksekutif LSN pernah menjadi peneliti di Pusat Studi Demokrasi (PSD) bentukan Denny J.A.<sup>25</sup> Widdi Aswinda Direktur Eksekutif JSI pernah menjadi Direktur Riset LSI Lingkaran.<sup>26</sup> JSI pun secara terbuka menyebutkan bahwa para pegiat riset opini di lembaga itu dulunya pernah memiliki pengalaman panjang dalam riset dan konsultasi politik di institusi-institusi sejenis lainnya.<sup>27</sup>

Analisis yang tidak mudah dilakukan terkait dengan analisis lembaga dan individu itu terkait afiliasi dan klien yang pernah dilayaninya. Publikasi di laman resmi lembaga lebih banyak menampilkan data-data normatif. Adapun klien, baik institusi maupun individu yang memanfaatkan jasa lembaga-lembaga tersebut tidak dipublikasikan secara terbuka.<sup>28</sup> Karenanya, mengaitkan perbedaan hasil survei elektabilitas parpol dan profil lembaga (normatif) sulit dilakukan. Data-data normatif yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga riset opini tidak cukup untuk menjawab perbedaan profil itu. Alasannya karena

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 131.

<sup>25</sup> Lihat LSN, [http://lsn07.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=9&Itemid=5](http://lsn07.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=5) diakses pada 2 April 2013.

<sup>26</sup> Lihat <http://www.rmol.co/read/2011/11/05/44652/Tiga-Tahun-Beli-Kantor-Rp-6,5-Miliar-di-Kalibata> diakses pada 2 April 2013.

<sup>27</sup> Lihat [http://www.jsi-riset.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=91&Itemid=119](http://www.jsi-riset.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=119) diakses pada 2 April 2013.

<sup>28</sup> Berdasarkan pengalaman penulis saat mengumpulkan data hasil-hasil survei pilkada untuk kepentingan studi penulis (disertasi) bahwa lembaga riset opini memiliki salah satu kode etik untuk tidak membuka akses secara terbuka hasil-hasil risetnya tanpa persetujuan dari klien pemberi pekerjaan sekaligus penyandang dana riset. Penulis pernah melakukan komunikasi melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan salah satu direktur di lembaga riset opini terkenal berbasis di Jakarta untuk memohon akses mengenai data hasil survei pilkada. Lembaga riset opini tersebut menjelaskan tentang kode etik penggunaan hasil survei. Hasil komunikasi ini yang menjadi dasar pengalaman penulis terkait kode etik tersebut. Selain itu, Direktur Eksekutif LSN Umar S. Bakri pernah menyatakan hal serupa dan menyebut kode etik tersebut sebagai prinsip anonimitas. Pernyataan Umar S. Bakri bisa diakses secara *online* dalam Praga Utama, "LSN: Survei Politik Pasti Dibiayai", <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/06/078478128/p-LSN-Survei-Politik-Pasti-Dibiayai> diakses pada 28 Juni 2013.

<sup>19</sup> Mengenai klaim latar belakang pengurus LSI Lembaga diberitakan berbagai media massa. Mengenai klaim latar belakang Denny J.A. dan Bima Arya Sugiarto. Lihat Qodari, *loc.cit.*, hlm. 137.

<sup>20</sup> [http://www.jsi-riset.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=91&Itemid=119](http://www.jsi-riset.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=119) diakses pada 2 April 2013.

<sup>21</sup> LSN, [http://lsn07.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=9&Itemid=5](http://lsn07.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=5) diakses pada 2 April 2013.

<sup>22</sup> Lihat <http://lembagasurveijakarta.com/sample-page/> diakses pada 2 April 2013.

<sup>23</sup> Muhammad Qodari, *loc.cit.*, hlm. 137.

data profil lembaga justru menunjukkan karakter institusi yang hanya berbeda dalam bentuk lembaga, yaitu lembaga berorientasi mencari profit dan nonprofit. Apalagi semua lembaga mengklaim identitas dirinya bersifat independen dan nonpartisan sebagaimana dirangkum dalam Tabel 4.

Satu faktor penjelas lain bisa dikaitkan dengan rilis hasil survei elektabilitas yang dilakukan pada 2012 sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 1. Rilis hasil survei dalam rentang mulai Agustus hingga Oktober 2012 menunjukkan tren peringkat elektabilitas yang sama. LSI Lingkaran, SMRC, JSI, dan Charta Politika menempatkan Partai Golkar sebagai parpol dengan nilai elektabilitas tertinggi, kemudian disusul PDI-P dan Partai Demokrat.

Angka rilis nilai elektabilitas tertinggi diraih Partai Golkar berdasarkan hasil riset LSI Lingkaran pada Oktober 2012 sebesar 21%. Nilai elektabilitas terendah untuk Partai Golkar disampaikan dalam rilis SMRC pada hari yang sama dengan LSI Lingkaran merilis hasil surveinya sebesar 14%. Bila melihat nilai elektabilitas PDI-P dan Partai Demokrat, LSI Lingkaran mempublikasikan nilai yang lebih tinggi dibanding SMRC, JSI, dan Charta Politika. Artinya, ada perbedaan nilai elektabilitas atas rilis hasil-hasil survei tersebut dan prediksi elektabilitas parpol menurut LSI Lingkaran lebih besar daripada tiga lembaga riset opini lainnya. Hal ini terutama tampak dari besarnya nilai elektabilitas Partai Demokrat yang mencapai 14% mendekati akhir tahun 2012, sebagaimana hasil survei LSI Lingkaran. Padahal hasil survei lainnya justru menyebut nilai elektabilitas Partai Demokrat terus menurun hingga di bawah 10%.

Meskipun demikian, hasil perbandingan nilai elektabilitas tersebut tidak cukup untuk menjelaskan logika keterkaitannya dengan profil lembaga dan kepentingan (politik) terhadap publikasi hasil riset opini. Dengan kata lain, analisis profil lembaga tidak memadai untuk menjelaskan perbedaan nilai-nilai elektabilitas tiga parpol besar menjelang Pemilu 2014.

### Penjelasan Data *Swing Voters*

Upaya menjawab perbedaan nilai-nilai elektabilitas parpol berdasarkan hasil survei oleh

lembaga-lembaga riset opini yang ketiga bisa dilakukan melalui besarnya *swing voters* yang berhasil diidentifikasi dalam hasil-hasil riset tersebut. SMRC merilis hasil survei khusus tentang fakta dan data *swing voters* pemilih parpol menjelang Pemilu 2014. Dalam presentasi yang dirilis secara resmi pada 14 Oktober 2012, SMRC mendefinisikan *swing voter* sebagai “Perilaku pemilih yang berubah atau berpindah pilihan partai atau calon dari satu pemilu ke pemilu berikutnya”.<sup>29</sup>

SMRC menggunakan empat indikator untuk melokalisasi fakta *swing voters* di Indonesia, yaitu (1) perubahan perolehan suara dari pemilu ke pemilu; (2) tidak bisa memilih secara spontan terhadap partai; (3) tren dinamis pilihan pada partai dengan simulasi daftar partai; (4) tren pilihan partai sekarang pada pemilih partai dalam Pemilu 2009.<sup>30</sup>

Menurut riset SMRC, potensi *swing voters* dalam Pemilu Indonesia sangat besar. Berdasarkan indikator yang digunakannya angka *swing voters* bisa diketahui dari perubahan perolehan suara parpol dalam tiga kali pemilu di Era Reformasi. Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009 selalu menghasilkan tiga parpol pengumpul suara terbanyak yang saling bergantian. Indikasi lainnya ditunjukkan oleh semakin terfragmentasinya konstelasi politik antarpol. Parpol yang memenuhi ambang batas parlemen menjadi semakin banyak.<sup>31</sup>

Dalam istilah hasil survei yang dirilis lembaga-lembaga riset opini di Indonesia, makna *swing voters* menjadi lebih luas, bukan lagi sekadar perubahan pilihan partai atau kandidat. Hasil riset opini biasanya menyebut sebagai pemilih yang belum menentukan pilihannya atau belum tahu akan memilih partai tertentu dalam pemilu (*the undecided*).<sup>32</sup> Seluruh lembaga riset opini menggunakan istilah “belum tahu atau

<sup>29</sup> Presentasi SMRC, 2012, *slide* no. 2.

<sup>30</sup> *Ibid.*, *slide* no.3.

<sup>31</sup> Indonesia 2014, “Swing Voter Akibatkan Suara Partai Naik atau Turun Tajam,” <http://www.indonesia-2014.com/read/2012/11/19/swing-voter-akibatkan-suara-partai-naik-atau-turun-tajam> diakses pada 30 Maret 2013.

<sup>32</sup> Lihat rilis hasil survei Charta Politika pada 30 Agustus 2012. Sumber: <http://politik.pelitaonline.com/news/2012/08/30/hasil-survei-hadapi-Pemilu-2014-pemilih-makin-stagnan> diakses pada 30 Maret 2013.

**Tabel 5.** *Swing Voters* dalam Hasil Riset Opini Elektabilitas Partai Politik 2012–2013\*

Swing Voters	Lembaga Riset Opini								
	LSI Lembaga	Charta Politika	JSI	SMRC 1	LSI Lingkaran	SMRC 2	LSJ	Publika RC	LSN
Belum Tahu/ Menentukan (%)	51	34,4	26,7	23	TK	21,4	TK	59,7	TK
Waktu Survei	1-12 Februari 2012	8-22 Juli 2012	17-21 Juli 2012	5-16 September 2012	1-8 Oktober 2012	6-20 Desember 2012	9-15 Februari 2013	18-21 Februari 2013	26 Fe- bruari-15 Maret 2013

Keterangan: TK= tanpa keterangan

\* Sumber data sama dengan sumber data nilai-nilai elektabilitas parpol pada Tabel 1 dan Tabel 2.

belum menentukan” dalam publikasi hasil-hasil survei mereka.

Meskipun fenomena *swing voters* merupakan fakta yang wajar di sebuah negara dengan pemilu yang telah dilakukan secara reguler, namun tetap saja penting bila dikaitkan dengan nilai elektabilitas parpol yang berbeda menjelang Pemilu 2014 yang dirilis lembaga-lembaga riset opini. Apakah perbedaan nilai elektabilitas parpol sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 disebabkan oleh perbedaan angka *swing voters* yang diketahui dari setiap hasil survei?

Bila merujuk pada Tabel 5 yang memperlihatkan nilai-nilai *swing voters* yang disebutkan dalam rilis lembaga-lembaga riset opini, seperti-nya tidak memadai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Perbedaan nilai *swing voters* berdasarkan rilis hasil survei SMRC 1, JSI, dan Charta Politika terpaut antara 3,7 hingga 11,4%. Sementara itu, Tabel 1 dan Tabel 2 memperlihatkan selisih angka *swing voters* ketiga survei tersebut tidak relevan untuk menjelaskan perbedaan nilai elektabilitas antartiga parpol besar dengan nilai elektabilitas tertinggi.

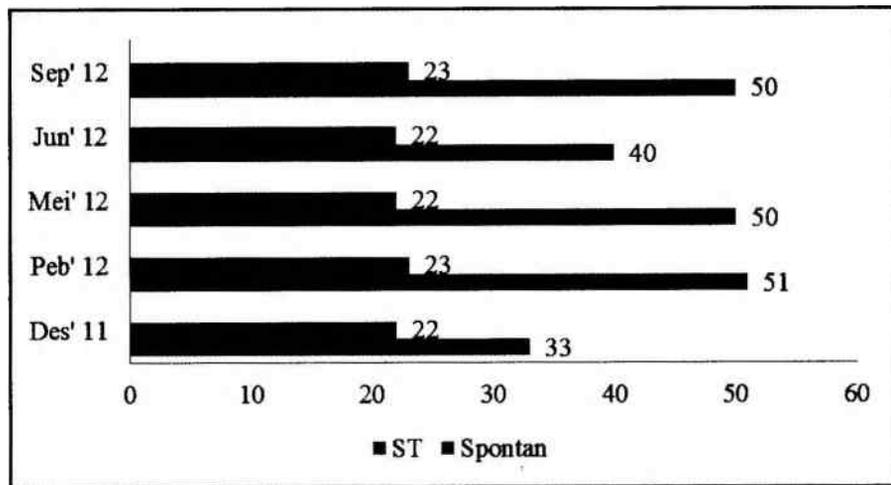
Kecilnya nilai elektabilitas Partai Golkar, PDI-P, dan Partai Demokrat dalam survei yang dirilis oleh SMRC pada Oktober 2012 dibanding survei serupa yang dilakukan JSI disebabkan oleh besarnya nilai *swing voters* yang mencapai angka 50%. Begitu pula dengan nilai *swing voters* yang lebih kecil ditemukan Charta Politika dibanding SMRC berbanding lurus dengan angka elektabilitas yang lebih besar dari tiga partai tersebut.

Kemudian, membandingkan dua hasil survei SMRC yang dirilis dalam rentang waktu empat

bulan yang berbeda, hasilnya masih menunjukkan konsistensi. Kenaikan nilai elektabilitas yang cukup besar dari Partai Golkar dan PDI-P diikuti dengan penurunan angka *swing voters*. Selain itu, kenaikan elektabilitas tersebut diikuti dengan peningkatan angka elektabilitas parpol lain, yaitu PKB, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Hanura.

Meskipun demikian, masih ada pula satu perbedaan yang membutuhkan jawaban bila membandingkan hasil survei SMRC yang dirilis pada Oktober 2012 dengan hasil survei LSI lembaga yang dirilis delapan bulan sebelumnya. LSI Lembaga menemukan angka *swing voters* yang lebih besar, yaitu 51%. Angka itu jauh lebih besar dari temuan SMRC dengan rentang waktu survei yang terpaut cukup jauh. Selain itu, nilai elektabilitas Partai Golkar, PDI-P, dan Partai Demokrat berdasarkan temuan LSI Lembaga pun lebih besar dari temuan SMRC. Selisih akumulasi angka elektabilitas tiga parpol tersebut lebih besar 11,8% untuk temuan LSI Lembaga daripada SMRC.

Namun, setelah membandingkan nilai total dari perolehan nilai elektabilitas dan *swing voters* antara hasil survei LSI Lembaga dan SMRC perbedaan itu dinilai wajar. Total nilai elektabilitas yang dirilis LSI Lembaga, termasuk angka *swing voters*, mencapai 117,2% dan SMRC sebesar 99,5%. Oleh karena itu, selisih 17,7% nilai itulah yang menjawab perbedaan akumulasi nilai-nilai elektabilitas dan angka *swing voters* hasil survei dua lembaga itu. Perbedaan definisi atau kriteria *swing voters* oleh LSI lembaga dan SMRC memungkinkan perbedaan angka terse-



Keterangan: ST = semi terbuka atau simulasi dengan daftar nama dan gambar partai; Spontan = pilihan spontan.

\* SMRC, *op. cit.*, slide no. 28 dan 35. Spontan artinya pilihan spontan. ST singkatan dari semi terbuka atau wawancara dilakukan dengan simulasi dengan daftar nama dan gambar partai.

**Grafik 1.** Jawaban “Belum Tahu” Terhadap Pilihan Parpol Berdasarkan Hasil Survei SMRC

but, termasuk penjelasan mengenai total nilai elektabilitas yang dirilis LSI Lembaga (termasuk angka *swing voters*), yang melebihi nilai 100%. Terdapat kemungkinan penghitungan ganda karena perbedaan definisi dan kriteria *swing voters*.<sup>33</sup>

Dengan demikian, penjelasan perbedaan nilai elektabilitas dikaitkan dengan perbedaan angka *swing voters* yang kurang relevan karena faktanya angka *swing voters* terus menurun saat semakin mendekati penyelenggaraan Pemilu. Simulasi yang dilakukan SMRC dengan menggunakan pertanyaan semi terbuka mengenai parpol yang akan dipilih, menunjukkan angka

*swing voters* yang stabil antara 22 hingga 23% (Grafik 1).

Sementara itu, melihat tren angka *swing voters* sebelum Pemilu 2009 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6 cukup konsisten. Menurut hasil survei LSI Lembaga, angka *swing voters* terus mengalami penurunan semakin mendekati pemilu. Bahkan satu bulan menjelang Pemilu 2009, angka *swing voters* tinggal 9%. Tidak demikian dengan hasil survei Indo Barometer yang menemukan angka *swing voters* yang fluktuatif. Hingga Juni 2008, angka *swing voters* mencapai 29,4%. Meskipun begitu, angka tersebut sebenarnya tidak terpaut jauh dengan temuan LSI lembaga yang memperkirakan angka *swing voters* sebesar 25% pada September 2008.

Selain faktor jarak waktu menuju penyelenggaraan pemilu, besarnya angka *swing voters* dalam pemilu, khususnya pemilu legislatif, di Indonesia bisa pula disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Hasil studi politik aliran dan keterikatan pemilih terhadap parpol yang dilakukan Andreas Ufen (2008) hingga Pemilu 2014 memberikan sejumlah jawaban. Meskipun tidak secara spesifik menjelaskan tentang fakta *swing voters*, menurut Ufen, analisis politik aliran masih relevan diterapkan dalam studi kepartaian dan pemilih di Indonesia, ia menyebutnya sebagai

<sup>33</sup> Terkait perbedaan angka *swing voters* yang dirilis tujuh lembaga riset opini, penulis menduga pula disebabkan kelemahan penggunaan konsep *swing voters* sehingga berdampak pada perbedaan angka tersebut. Satu hasil studi *swing voters* yang cukup penting dan komprehensif ditunjukkan William G. Mayer. Mayer (2007) menggunakan pertanyaan-pertanyaan “feeling thermometer” yang dikembangkan the American National Election Studies (NES) guna memilah *swing voters* dan non-*swing voters*. Dengan metode itu, Mayer bisa memperluas cakupan definisi *swing voters* dan tentunya mampu mendeteksi lebih baik siapa yang terkategori *swing voters*. Dari hasil studinya, Mayer menawarkan tiga definisi alternatif *swing voters*, yaitu sebagai *political independent* (tidak memiliki afiliasi parpol), *party switcher* (pemilih yang berganti partai dari satu pemilu ke pemilu lainnya), *the undecided* (tidak tahu akan memilih siapa atau partai apa dalam pemilu). William G. Mayer, “The Swing Voter in American Presidential Election”, *American Politics Research*, Vol. 35, No. 3, Mei 2007, hlm. 362–365.

**Tabel 6.** *Swing Voters* dalam Hasil Riset Opini Menjelang Pemilu 2009

LSI Lembaga		Indo Barometer	
Waktu Survei	Belum tahu/belum menentukan (%)	Waktu Survei	Belum tahu/belum menentukan (%)
8–18 Februari 2009	9		
10–22 Desember 2008	20		
26 Oktober–5 November 2008	25	5–16 Juni 2008	29,4
8–20 September 2008	25	Desember 2007	17,7
25 September–2 Oktober 2007	29	Mei 2007	26,5

Sumber: [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2009](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009) diakses 6 April 2013

*modified aliran approach*. Yang menarik dan relevan dari temuan Ufen adalah penjelasan mengenai fakta *dealignment* atau keterputusan afiliasi antara partai politik dan pendukungnya.<sup>34</sup>

Gejala *dealignment* diindikasikan oleh tujuh hal yang berhasil diobservasi oleh Ufen:<sup>35</sup>

*This dealignment is inter alia indicated by seven features: first, the rise of presidential or presidentialized parties with weakened political machines, the simulation of populism and the surging impact of mass media and modern campaign techniques; second, the authoritarianism and personalism within parties with powerful 'adviser' and executives that punish unruly members, marginalize internal opposition and increase factionalization; third, the dominance of 'money politics' with bought candidacies, MPs acting as broker for private companies, businessmen taking over party chairmanships, and billionaire financiers determining policies behind the scenes; fourth, poor political platforms centered on very general ideologies; fifth, decreasing party loyalties with only 'emotional' linkages between voters and parties; sixth, the cartel-like cooperation of parties as indicated by rainbow coalitions, an unorganized opposition, the musyawarah dan mufakat mechanism and the collusion in tolerating corruption; and finally, the formation of new, powerful local elites, stimulated by decentralization and invigorated by the pilkada.*

Selain ketujuh fakta itu, Ufen melihat dampak perubahan sosial sebagai penyebab termodifikasinya politik aliran dan munculnya *dealignment*, yaitu perubahan pola hubungan antara kelas kapital dan kelas politik, perubahan pola pendidikan, dan semakin pentingnya peran

media massa.<sup>36</sup> Ketiga faktor tersebut diyakini ikut mendorong semakin rendahnya keterikatan warga dengan partai politik. Logikanya, semakin kuat gejala *dealignment* akan mendorong semakin besarnya angka *swing voters*. Karena itu, hasil studi Ufen cukup bisa menjelaskan fakta dan data *swing voters* yang cukup besar ditemukan dalam setiap hasil survei oleh lembaga-lembaga riset opini. Apalagi, kalau merujuk pada hasil-hasil riset tersebut angka *swing voters* selalu di atas 20%.

Berdasarkan penjelasan perbandingan hasil-hasil survei menjelang Pemilu 2014 dan studi tentang *dealignment* antara parpol dan pemilih, perbedaan angka *swing voters* dari hasil survei lembaga-lembaga riset opini dinilai tidak cukup kuat menjelaskan perbedaan nilai-nilai elektabilitas parpol yang dirilis lembaga-lembaga riset opini tersebut. Karena perbedaan angka elektabilitas antarpol semestinya diikuti perbedaan angka *swing voters* yang sebanding. Hanya saja, penulis masih mempunyai pertanyaan terkait hasil-hasil riset opini itu. Sebegitu dinamikah pemilih di Indonesia? Karena survei yang diadakan dalam waktu hampir bersamaan menghasilkan disparitas *swing voters* yang besar.

### Jajak Pendapat dan Politik Konsultasi

Di negara-negara yang demokratis, peran riset opini atau jajak pendapat tidak bisa dikesampingkan. Jajak pendapat bisa membantu terwujudnya akuntabilitas pemerintahan terpilih. Menurut Jacobs and Shapiro, jajak pendapat bisa mengidentifikasi masalah yang dianggap penting oleh publik atau pemilih untuk diselesaikan oleh kandidat dan kebijakan-kebijakan yang

<sup>34</sup> Dalam istilah bahasa Inggris kata *alignment* diartikan sebagai kesepakatan antara sekelompok pejabat negara, partai politik, atau warga yang bekerja sama karena adanya kesamaan kepentingan dan tujuan. Lebih singkatnya *alignment* berarti keterikatan atau ikatan.

<sup>35</sup> A. Ufen, "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia", *South East Asia Research*, Vol. 16, No. 1, 2008, hlm. 34.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 35–36.

diinginkan oleh pemilih yang mesti didukung oleh para kandidat. Selain itu, riset opini bisa mendorong ketanggapan demokratis (*democratic responsiveness*) yang membantu para petahana (*incumbents*) untuk mengantisipasi harapan para pemilih dalam pemilu.<sup>37</sup>

Selain itu, posisi riset opini dalam demokrasi sangat penting karena riset opini disejajarkan sebagai salah satu representasi pendapat publik, selain pemilu. Di negara yang demokratis, opini publik yang diperoleh melalui riset opini yang berkualitas merupakan bentuk ekspresi publik terhadap pemerintahan dan situasi yang tengah berjalan. Karenanya, setiap sistem politik memperhitungkan opini publik. Opini publik bisa dikatakan pula sebagai bentuk legitimasi pemimpin atau pemerintahan.<sup>38</sup>

Dalam konteks yang lebih umum, Lipari mengategorikan tiga mazhab tentang hubungan jajak pendapat dan opini publik. Pertama, mazhab populis yang berpandangan bahwa apabila jajak pendapat dilakukan dengan benar akan mampu mengekspresikan keinginan warga dan memfasilitasi pembuatan kebijakan yang demokratis. Kedua, mazhab kritis yang berpendapat bahwa jajak pendapat tidak bisa mengukur opini publik. Alasannya, baik jajak pendapat maupun publik dimanipulasi oleh upaya-upaya para elite untuk mengejar dan mendomestikasi (memperlunak) kekuatan transformatif aksi kolektif warga.<sup>39</sup>

Ketiga, perspektif konstruksionis yang memandang riset opini publik sebagai mekanisme demokrasi yang terkelola (*managed democracy*). Pandangan konstruksionis menganggap opini publik sebagai *epiphenomenal* atau hasil proses interaksi yang bersifat sosial dan komunikatif. Penganut pandangan ini memusatkan kajiannya pada bahasa dan proses-proses simbolik sebagai unit analisis dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang konstruksi sosial atas realitas.<sup>40</sup>

Dari tiga pendekatan ini bisa ditarik gambaran bahwa posisi jajak pendapat dalam

menilai sekaligus membentuk opini publik tidak selamanya dilakukan dalam situasi yang hampa atau tanpa kepentingan. Bahwa jajak pendapat dan opini publik bisa membantu tumbuhnya demokrasi memang tampak hasilnya. Terutama saat jajak pendapat berhasil merangkum opini warga terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah dan penyelenggara negara lainnya. Jajak pendapat merupakan mekanisme efektif mengontrol dan mengukur akuntabilitas pemerintahan terhadap warganya. Namun, jajak pendapat memungkinkan menjadi satu instrumen bagi penguasa atau pihak-pihak yang berkompetisi dalam arena kontestasi politik. Hasil jajak pendapat yang didorong seolah merepresentasikan opini publik, bisa menjadi alat propaganda pemerintah atau kampanye politik.

Dalam perjalanannya, ternyata jajak pendapat mengalami pasang surut, terutama sorotan publik dan media massa terhadap perbedaan hasil-hasil jajak pendapat politik. Moore membuat salah satu subjudul dalam bukunya "*Pollsters under Attack*" (Lembaga-Lembaga Jajak Pendapat dalam Serangan). Mantan editor pelaksana dan editor senior *The Gallup Organization* itu menceritakan serangan media dan banyak kalangan di Amerika terhadap perbedaan hasil survei Gallup dan Pew Research terkait Pemilu Presiden Amerika tahun 2004. Saat itu Gallup memperkirakan keunggulan President *incumbent* George W. Bush dari Calon Partai Demokrat Senator John Kerry.<sup>41</sup> Sebaliknya, Pew Research memasang judul utama hasil jajak pendapatnya "*Kerry Support Rebounds; Race Again Even*" (Dukungan Kerry Melambung; Pertarungan Kembali Sama Kuat).<sup>42</sup>

Dalam ekspresi yang berbeda, Jacobs dan Shapiro menyebut istilah "*under fire*". Menurut keduanya, selain berkontribusi terhadap pemilu dan demokrasi, jajak pendapat dipersalahkan karena para pejabat terpilih menggunakannya secara berlebihan. Pejabat yang semestinya mengandalkan pertimbangan independen terhadap kebijakan yang dibuat dan dijalankannya malah

<sup>37</sup> Lawrence R. Jacob dan Robert Y. Shapiro, "Polling Politics, Media, and Election Campaigns", *Public Opinion Quarterly*, Vol. 5, Special Issue 2005, hlm. 635.

<sup>38</sup> Williams dan Edi, dalam Carrol J. Glynn (Eds), *Public Opinion*, (Colorado: Westview Press, 1999), hlm. 213.

<sup>39</sup> L. Lipari, "Polling as Ritual", *Journal of Communication*, Winter, 1999, hlm. 84–85.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 86

<sup>41</sup> Saat itu Gallup memperkirakan keunggulan Bush sebesar 3 poin persentase di atas Kerry sebelum Konvensi Partai Republik, dan Bush diperkirakan unggul hingga 7 poin setelah konvensi. Sepuluh hari kemudian Gallup merilis keunggulan tambahan Bush sebesar 6 poin dari Kerry hingga unggul 55% banding 42%.

<sup>42</sup> D.W. Moore, *The Opinion Makers: An Insider Exposes the Truth Behind the Polls*, (Boston: Beacon Press, 2008), hlm. 101.

lebih memilih preferensi publik yang diperkirakan lewat jajak pendapat.<sup>43</sup> Persoalannya adalah seberapa independen jajak pendapat tersebut berhasil memotret pendapat publik? Apakah mewakili kepentingan seluruh warga atau hanya suara sekelompok kecil orang tertentu?

Jacob dan Shapiro menuding kesalahan metode telah membuka pintu masuk subjektivitas dan bias partisan, yang memungkinkan lembaga-lembaga riset opini “menggoreng” datanya untuk keuntungan kandidat-kandidat yang dipreferensikannya.<sup>44</sup> Moore memberikan penjelasan kegagalan “permainan” kepentingan kebanyakan lembaga-lembaga jajak pendapat di Amerika saat akan menyerang Irak. Lembaga-lembaga riset opini saat itu mengklaim mengukur preferensi publik atas kebijakan itu, justru menghasilkan pembacaan yang menyimpang dan salah terhadap opini publik Amerika dan malah merusak proses demokrasi. Secara lebih gamblang lagi, bias hasil-hasil jajak pendapat dikatakan Moore sebagai berikut, “*It’s crucial to recognize that the role polls play in serving the media’s power bias is to provide closure to a cycle that legitimizes the policies of those in power*”.<sup>45</sup>

Fakta yang disajikan Moore dan artikulasi Jacob dan Shapiro memperkuat pendekatan kritis dalam mengkaji data hasil-hasil riset opini. Sebagaimana disampaikan Lipari, pendekatan kritis meminjam pertanyaan-pertanyaan berbasis sosial dan politik yang memusatkan pada analisis sosial dan makro, termasuk pertanyaan-pertanyaan terkait kekuasaan dan dominasi. Terutama terkait bagaimana para elit menggunakan riset-riset opini untuk mengelola dan mengontrol pendapat publik.<sup>46</sup> Dengan kata lain, fakta-fakta hasil riset opini tidaklah selalu merupakan fakta yang netral atau tanpa kepentingan. Melainkan merupakan hasil permufakatan, baik dari para penyelenggara maupun penyandang dana dan pemanfaat hasil jajak pendapat.

Beberapa hasil kajian yang diartikulasi oleh Lipari yang melihat jajak pendapat dalam perspektif kritis, di antaranya Ginsberg yang menemukan bahwa meskipun tidak menjamin

keberhasilannya, jajak pendapat telah menyediakan pemerintah satu kesempatan yang lebih baik untuk mengantisipasi, meregulasi, dan memanipulasi sikap-sikap publik yang dikehendaki. Kemudian Herbst menemukan bahwa daya tarik demokratis yang melekat pada kegiatan-kegiatan jajak pendapat karena memperlakukan seluruh pendapat secara sama dan mengubah fenomena yang sukar dipahami menjadi kelihatan nyata. Selain itu, Christian yang menyatakan bahwa jajak pendapat media dan pendapat publik kontemporer berfungsi seperti propaganda sosiologis tersembunyi yang merusak proses-proses rasional berbasis diskursus.<sup>47</sup>

Berdasarkan fakta hasil-hasil studi dan pendekatan itulah maka penulis memutuskan untuk mereferensi hasil studi Mietzner yang mengkaji jajak pendapat politik pasca-eratoritarianisme di Indonesia. Meski kajiannya memfokuskan pada peran jajak pendapat politik dalam mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia, namun temuan Mietzner bisa memberi alternatif jawaban atas persoalan disparitas nilai elektabilitas parpol berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga-lembaga riset opini menjelang Pemilu 2014.

Eksistensi lembaga-lembaga riset opini telah mengubah, baik wajah demokrasi nasional maupun lokal di Indonesia. Pasar demokrasi dan riset opini berhasil mengubah popularitas sebagai orientasi baru partai politik dan politisi dalam pencalonan daripada kapabilitas kandidat, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Ukuran-ukuran popularitas<sup>48</sup> individu telah mengubah loyalitas dan posisi kader parpol dalam percaturan demokrasi elektoral di daerah. Selain itu, popularitas telah menegasi upaya-upaya parpol untuk berkiprah dalam mewarnai dinamika politik lokal.<sup>49</sup>

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 85–86.

<sup>44</sup> Lembaga riset opini biasanya membagi tiga ukuran popularitas individu maupun parpol secara operasional menjadi tingkat kesukaan (*likeability*), keterampilan/tahu (*recognition*), dan keterpilihan (*electability*). Qodari menyebutnya sebagai dua atribut potensi kemenangan kandidat berupa *recognition* dan *likeability* yang akan membentuk *electability*. Lihat Qodari, *op. cit.*, hlm. 133.

<sup>45</sup> M. Mietzner, “Political Opinion Polling in Post-Authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation?” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 165, No. 1, 2009, hlm. 111–112.

<sup>43</sup> Jacob dan Shapiro, *loc. cit.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 636.

<sup>45</sup> Moore, *op. cit.*, hlm. 102–103.

<sup>46</sup> Lipari, *op. cit.*, hlm. 85.

Dalam struktur lembaga-lembaga riset opini di Indonesia, gejala yang nampak adalah munculnya rivalitas antarlembaga karena perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dalam penyelenggaraan riset opini. Mietzner memetakan dua kubu institusi yang cenderung bertolak belakang dalam pendekatan kepentingan penyelenggaraan jajak pendapat, yaitu “kubu akademisi” dan “kubu komersil”. Kubu pertama memegang prinsip bahwa jajak pendapat semestinya berusaha memenuhi kebutuhan publik atas informasi dan transparansi politik. Kubu ini dikenal sebagai kelompok nonkonsultan. Jajak pendapat hanya ditujukan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan kandidat yang akan maju dalam kontestasi politik. Mereka tidak terlibat dalam jasa konsultasi pemenangan kandidat.<sup>50</sup>

Kubu kedua melakukan praktik riset opini dan konsultasi, termasuk mengorganisasi kampanye dan pemenangan kandidat, partai politik, dan pencitraan calon serta desain iklan dan slogan kampanye.<sup>51</sup> Majalah *Tempo* edisi 30 Juli 2012 memunculkan istilah “supermarket pemilihan umum” untuk lembaga seperti ini. Paket pemenangan secara lengkap ditangani satu lembaga yang memiliki divisi-divisi khusus mulai dari riset opini hingga pencitraan dan iklan.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 117–119. Mietzner menjelaskan awal mula munculnya kubu akademisi dan kubu komersil karena adanya perbedaan paradigmatis mengenai peran *pollsters*, khususnya antara dua tokoh besar pegiat jajak pendapat, Saiful Mujani dan Denny J.A., ketika keduanya masih berada dalam satu wadah LSI Lembaga. Mujani berpandangan bahwa misi LSI Lembaga ditujukan untuk mengetahui harapan-harapan masyarakat agar elite bisa meresponsnya secara efektif. Denny berpandangan bahwa selain menyampaikan hasil riset opini kepada elite dan rakyat, LSI Lembaga bisa pula melakukan kerja sama dengan kandidat potensial dan kuat dan memberikan fungsi konsultasi. Perbedaan pandangan tersebut kemudian diikuti kegiatan-kegiatan Denny yang memberikan praktik konsultasi dalam kampanye pencalonan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden tahun 2004. Langkah-langkah Denny tersebut mengganggu hubungannya dengan Mujani dan kawan-kawan sepaham dan JICA selaku penyandang dana LSI Lembaga waktu itu. Perbedaan pandangan itulah yang disinyalir menjadi salah satu penyebab perpecahan Mujani dan Denny, hingga pada Mei 2005 Denny meninggalkan LSI Lembaga kemudian mendirikan LSI Lingkaran. Penuturan Mietzner dalam karyanya didasarkan pada hasil wawancara dengan Saiful Mujani dan mengutip pemberitaan Majalah *Tempo* edisi. 39/XXXVI/19–25 November 2007 dan *Harian Kompas* Edisi 29 Juni 2004.

<sup>52</sup> Dalam laporan berjudul “Legitnya Bisnis Konsultan Pilkada” Majalah *Tempo* Edisi 30 Juli 2012 menyebut Lingkaran Survei

Apabila mengacu pada profil normatif masing-masing lembaga riset opini sebagaimana terangkum dalam Tabel 5 maka kategori kubu akademisi dan komersil bisa digunakan. Yang termasuk kubu akademisi, yaitu LSI Lembaga, LSN, Charta Politika, dan LSJ. Lembaga-lembaga ini secara normatif menyatakan sebagai institusi yang hanya menjalankan riset tanpa melakukan konsultasi politik untuk pemenangan kandidat. Sementara itu, lembaga yang terkategori kubu komersil, yakni LSI Lingkaran,<sup>53</sup> SMRC, dan JSI. Mereka secara tegas menyebutkan pelayanan jasa praktik konsultasi politik.<sup>54</sup>

Catatan penting yang bisa ditarik dari dua kategori lembaga riset opini di Indonesia, yakni terkait perubahan orientasi demokrasi. Riset-riset opini telah mendorong orientasi praktis kandidat dan partai politik dalam mempraktikkan demokrasi. Demokrasi rasional atau demokrasi yang efisien menjadi resultan dari keterlibatan lembaga-lembaga riset opini dalam membentuk demokrasi nasional dan lokal seperti pasar politik. Biaya untuk maju dalam arena, baik pemilu maupun pilkada dikeluarkan untuk membiayai lembaga riset opini dalam memberikan pelayanan paket pemenangan pemilu dengan tujuan memperoleh jabatan publik.

Mietzner mengingatkan dengan tegas tentang risiko rivalitas antara dua kubu lembaga riset opini. Kekhawatiran munculnya survei opini yang manipulatif, komersial, dan berpotensi partisan tidak terelakkan. Konsekuensinya, reliabilitas data jajak pendapat bisa dipertanyakan.<sup>55</sup> Meskipun begitu, kategorisasi kubu-kubu lembaga riset opini menurut Mietzner tampaknya mulai kehilangan relevansinya. Mengingat terjadinya dinamika orientasi para pegiat riset opini. Saiful Mujani yang dalam tulisan Mietzner menolak LSI Lembaga terlibat dalam praktik konsultasi politik,<sup>56</sup> kemudian mendirikan

Indonesia pimpinan Denny J.A. sebagai pencetus ide “Supermarket Pemilihan Umum”.

<sup>53</sup> *Ibid.*, Majalah *Tempo* Edisi 30 Juli 2012.

<sup>54</sup> Penulis menyadari kelemahan kategorisasi tersebut dan memungkinkan terjadi kekeliruan karena tidak mendalami genealogi setiap lembaga survei. Setidaknya penulis menetapkan hasil kategori-kategori itu berdasarkan fakta yang disajikan dalam profil masing-masing lembaga riset opini. Penulis juga menyampaikan catatan kritis mengenai kategorisasi ini.

<sup>55</sup> Mietzner, *op. cit.*, hlm. 123.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 118–120.

SMRC yang secara jelas menyebutkan pelayanan jasa konsultasi politik. Sebagaimana disebutkan dalam laman resminya, “SMRC menawarkan jasa konsultan politik yang terintegrasi. Berbasis data yang akurat, setiap strategi dirumuskan secara khusus untuk pemenangan Anda”.<sup>57</sup>

Catatan lainnya terkait pendanaan riset opini. Beberapa riset opini yang dipublikasikan biasanya didanai oleh lembaga riset opini itu sendiri. Dananya bersumber dari subsidi silang keuntungan yang disisihkan dari pelayanan jasa konsultasi politik yang disisih. LSI Lingkaran menyebutnya sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan riset-riset untuk kepentingan pemenangan biasanya didanai kandidat dan dengan berpegang pada prinsip anonimitas penyandang dana sehingga hasil surveinya tidak dipublikasikan.<sup>58</sup>

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kritis dalam mengkaji hasil-hasil riset opini tetap penting. Karena berdasarkan pendekatan kritis dan temuan studi tentang kategorisasi lembaga riset opini memberikan arah jawaban atas perbedaan nilai-nilai elektabilitas partai politik yang dirilis lembaga-lembaga tersebut. Perbedaan kepentingan memungkinkan disparitas angka-angka elektabilitas partai politik yang cukup besar meskipun penyelenggaraan survei dilakukan dalam waktu yang relatif bersamaan. Analisis “bias kepentingan” (survei partisan) terhadap hasil riset opini memungkinkan untuk digunakan dalam membaca perbedaan nilai-nilai elektabilitas hasil survei tersebut. Sementara itu, penggunaan kategorisasi kubu-kubu (*camp*s) lembaga riset opini pun tetap dibutuhkan untuk pemetaan awal.

## Mitos Pemilih Rasional<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Saiful Mujani, <http://www.saifulmujani.com/> diakses pada 2 April 2013.

<sup>58</sup> Berdasarkan pernyataan Peneliti LSI, Toto Izzul Fattah. Sumber: Berita Satu, “LSI Bantah Survei Calon DKI 1 Pesanan Foke”, <http://www.beritasatu.com/megapolitan/41325-lsi-bantah-survei-calon-dki-1-pesanan-foke.html>. Diakses pada 2 April 2013. Lihat juga Buku Digital Denny J.A., “*King Maker Politik Indonesia*”. Sumber: [http://lsi.co.id/buku/mens\\_obs\\_new.pdf](http://lsi.co.id/buku/mens_obs_new.pdf) diakses pada 28 Juni 2013.

<sup>59</sup> Penulis meminjam istilah subjudul ini dari buku *The Myth of the Rational Voter* karya Bryan Caplan (2007). Meskipun demikian, pengertian subjudul tersebut tidak seluruhnya sama dengan makna yang dimaksud Caplan.

Untuk menjawab pertanyaan kritis atas perbedaan nilai-nilai elektabilitas parpol yang dirilis lembaga-lembaga riset opini menjelang Pemilu 2014, penulis melakukan langkah berikutnya berupa verifikasi pendekatan aplikasi metodologi riset yang digunakan. Pertama, penulis melakukan verifikasi terhadap asumsi-asumsi yang digunakan lembaga riset opini dalam menganalisis dan menjelaskan kecenderungan perilaku pemilih. Kedua, penulis berupaya membedah asumsi-asumsi metodologis yang dipakai lembaga-lembaga riset opini.

Untuk mengetahui interpretasi lembaga riset opini terhadap hasil survei yang menjelaskan perilaku calon pemilih dalam Pemilu 2014, penulis merujuk pada penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh lembaga riset opini dalam rilis hasil risetnya. Tabel 8 memaparkan beberapa fakta tersebut.

Terlepas dari penggunaan judul-judul publikasi hasil survei yang dilakukan lembaga-lembaga riset opini, beberapa temuan cukup mampu menjelaskan asumsi-asumsi mereka dalam menjelaskan kecenderungan perilaku pemilih.<sup>60</sup> Pertama, responden atau calon pemilih dipersepsikan sebagai individu yang memiliki kapasitas independen menentukan pilihannya secara *decisive* (menentukan). Responden dianggap sebagai individu yang membuat keputusan tanpa pengaruh faktor-faktor struktural di luar dirinya. Padahal, fakta-fakta sosial, ekonomi, dan geografis dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam memiliki andil dalam mendorong pilihan politik warga.<sup>61</sup>

Kedua, responden atau calon pemilih ditampilkan sebagai sosok yang konsisten mengikuti dan mampu mengevaluasi setiap peristiwa dan isu politik yang menimpa partai politik, terutama parpol penyokong utama pemerintahan.

<sup>60</sup> Makalah ini tidak melakukan analisis politik media terhadap penulisan judul-judul yang digunakan untuk merepresentasikan isi materi publikasi. Setiap jurnalis dan editor yang membuat dan menentukan judul laporan tidak akan terlepas dari peran kebijakan redaksi dan politik media yang memengaruhinya. Karena itu, penulis tidak menganalisis judulnya, tetapi isi publikasinya.

<sup>61</sup> Lihat hasil studi Ananta, Arifin, dan Suryadinata (2004) bahwa agama tidak berperan menentukan pilihan warga. Faktor yang memiliki andil justru loyalitas etnis (meski lemah), pendidikan dan status migrasi. A. Ananta *et al.*, *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*, (Singapore: ISEAS Publishing, 2004), hlm. 154.

Logika kausalitas digunakan untuk menginterpretasikan penurunan atau peningkatan elektabilitas parpol tertentu dianggap sebagai bentuk sentimen negatif atau positif calon pemilih. Padahal, hasil-hasil survei tersebut masih dibayangi secara kuat oleh besarnya angka responden yang belum tahu atau belum menentukan pilihan (*the undecided*). Oleh karena itu, ketika lembaga riset opini memberikan pendapatnya bahwa parpol tertentu lebih unggul dari parpol lainnya seolah menegaskan data *the undecided*.<sup>62</sup> Sebaliknya, penulis berasumsi bahwa sangat mungkin para responden sebenarnya tidak mengetahui dan mengikuti perkembangan peristiwa politik, baik secara sengaja maupun tanpa intensi sehingga belum tahu atau belum menentukan pilihannya.

Calon pemilih yang diasumsikan serius melakukan evaluasi dan memutuskan untuk mengalihkan dukungan dari satu parpol ke parpol lainnya merupakan manifestasi penggunaan logika kausalitas lainnya. Penyelenggara riset menganalisis dan menginterpretasikan data seolah urusan politik begitu serius menjadi perhatian publik secara umum.<sup>63</sup> Pada akhirnya, hasil evaluasi yang tidak memuaskan membuat pemilih secara rasional mempertimbangkan untuk mengalihkan pilihannya dalam pemilu mendatang.

Selain itu, responden diperlakukan sebagai entitas yang terpengaruh oleh upaya-upaya parpol mengubah citra dan berupaya meraup dukungan. Pembentukan ormas-ormas sayap partai politik, seperti pendirian Baitul Muslimin Indonesia oleh PDI-P, dianggap merupakan langkah yang efektif menarik pemilih massa Islam. Asumsi-asumsi itu bertolak belakang dengan semakin menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga legislatif. Pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan para legislator dan politisi parpol lainnya dianggap mengingkari kepercayaan publik. Partisipasi politik warga dalam memilih anggota DPR ternyata tidak sebanding dengan harapan pemberantasan korupsi. Survei LSI pada Desember 2011 menempatkan partai politik

<sup>62</sup> Lihat Tabel 8 contoh analisis LSI Lingkaran poin kedua dan poin-poin analisis LSJ.

<sup>63</sup> Istilah publik perlu ditekankan mengingat pemilihan responden secara acak dalam riset opini memungkinkan semua warga negara yang memenuhi kriteria untuk disurvei memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih secara acak.

sebagai lembaga paling tidak bersih dari praktik korupsi dan diikuti DPR yang sangat berkaitan erat dengan partai politik.

Sejatinya, warga atau calon pemilih itu memiliki banyak keterbatasan. Sejak tahun 1950-an Downs sudah menyebut salah satu keterbatasan itu sebagai *lack of complete information* atau *imperfect knowledge*. Warga sebenarnya berpikir pragmatis dalam menentukan pilihan politiknya atau *rational ignorance*.<sup>64</sup> Untuk mendapat informasi yang lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memilih atau tidak memilih parpol tertentu dibutuhkan nilai usaha yang lebih besar daripada manfaat yang didapat atas dampak pilihannya. Karena itu, warga akan memilih tanpa pertimbangan yang matang atau bahkan menjadi apatis sama sekali. Memang ada sebagian warga yang memilih partai tertentu karena kebijakannya paling menguntungkan mereka, namun ada pula warga yang mengalami situasi ketidakpastian dalam memilih. Sementara itu, pihak yang berkepentingan, baik parpol maupun pemerintah, hanya menyampaikan informasi dan fakta yang bias dan cenderung menguntungkan diri dan kelompoknya. Karenanya, dalam memilih, banyak warga yang bertindak secara rasional atau mengandalkan efisiensi atas irasionalitas pilihannya karena usaha yang dikeluarkan dalam memilih lebih kecil dari manfaat yang didapatnya dengan memilih. Atau secara sederhana mereka memilih dengan asal saja atau tanpa alasan yang kuat (*ignore*).<sup>65</sup> Karena itu, *rational ignorance* muncul tatkala calon pemilih lelah untuk mencari informasi agar bisa menentukan pilihan dengan tepat.<sup>66</sup>

Sebagai reaksi terhadap konsep *rational ignorance* yang diteorikan oleh Downs, Caplan memunculkan konsep *rational irrationality*. Tetap dengan bertumpu pada dua variabel utama

<sup>64</sup> Downs mengingatkan bahwa yang dia maksud dengan kata rasional bukan lawan kata dari irasional. Pengertian rasional dipadankan dengan kata efisien untuk menekankan fakta bahwa warga yang rasional akan selalu bertindak atas dasar pertimbangan bahwa apa yang mereka dapat harus lebih sedikit dari apa yang mereka keluarkan.

<sup>65</sup> A. Downs, "An Economic Theory of Political Action in a Democracy", *Journal of Political Economy*, Vol. 65, No. 2, 1957, hlm. 139–140.

<sup>66</sup> B. Caplan, *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*, (New Jersey: Princeton University Press, 2007), hlm. 123.

dalam model pilihan ekonomi, yaitu preferensi dan harga. Preferensi dan harga saling melengkapi dalam membentuk kurva permintaan. Pada akhirnya konsumen memilih pada titik yang paling efisien dalam kurva permintaan tersebut. Namun, tidak bisa dilupakan bahwa adalah satu faktor lain dalam menentukan pilihan konsumen yang memiliki preferensi atas keyakinan (*beliefs*) yang diyakininya. Keyakinan yang tampak seperti nyata (*false beliefs*) bisa lebih mahal atau sama sekali gratis. Keyakinan atas apa yang tampak oleh konsumen membuatnya mengambil keputusan yang irasional secara material, namun rasional karena keyakinannya untuk tetap memilih apa yang diinginkannya. Perilaku memilih dengan konsep *rational irrationality* mewakili warga yang secara aktif menghindari kebenaran (pertimbangan efisiensi).<sup>67</sup>

Karena itu, cukup sulit memprediksi konsistensi perilaku memilih dan tidak mudah pula memprediksi dengan tepat alasan-alasan warga dalam memilih. Agak naif bila analisis hasil-hasil riset opini semata mempertimbangkan fakta-fakta agregat yang nampak secara numerikal, padahal banyak fakta yang tidak nampak justru lebih berperan menentukan pilihan warga. Penulis berasumsi bahwa konsepsi rasionalitas yang memungkinkan digunakan untuk memahami data-data hasil survei tersebut dalam pengertian rasionalitas praktis (*practical rationality*). Para calon pemilih memberikan jawaban spontan atau refleksi tanpa mempertimbangkan dengan matang atas pilihannya. Dengan demikian, perbedaan nilai-nilai elektabilitas antarpapol memungkinkan terjadi karena pertimbangan menentukan pilihan yang praktis.

Berikutnya terkait penggunaan asumsi-asumsi metodologis yang digunakan lembaga-lembaga riset opini yang seluruhnya bersandar pada pendekatan positivisme dalam memahami fenomena perilaku memilih. Lembaga-lembaga riset opini menerapkan metodologi penelitian sosial dengan pendekatan sains yang cukup ketat. Aturan-aturan atau hukum-hukum baku sains ilmiah memandu peneliti dalam pemilihan sampel, menguji keterhubungan antarvariabel, dan analisis temuan. Karena itu, perilaku politik warga disimplifikasi dengan angka-angka pre-

ferensi terhadap parpol dan variabel pendukung lainnya yang akan menunjang penjelasan perilaku memilih mereka.

Pendekatan metodologis seperti itu tentunya berkonsekuensi pada hasil riset tentang preferensi politik atau rasionalitas politik warga. Sayangnya, penjelasan rasionalitas yang berhasil digali oleh metodologi dengan pendekatan sains terlalu menekankan aspek rasionalitas instrumental. Padahal, menurut Lane dan Sears dalam kajian opini publik sekalipun, pada derajat tertentu inkonsistensi pendapat dan nilai-nilai individu itu ditoleransi dalam kategori rasionalitas. Indikator manusia rasional menurut mereka, yaitu "*he knows when to balance one value or personal interest off against another and maximizes consistency of his actions with the whole panoply of his values, beliefs, and interests*".<sup>68</sup> Untuk itu, penggunaan metodologi sains yang cenderung bebas nilai, objektif, dan independen dari konteks di mana manusia tinggal dan berinteraksi sebenarnya memiliki kelemahan dalam menginterpretasikan perilaku politik secara utuh.

Kritik yang dilontarkan Bent Flyvbjerg sangat relevan menjawab perdebatan metodologis dalam mengukur rasionalitas manusia, khususnya dalam perilaku politiknya. Ia merujuk pada tiga kebajikan intelektual (*intellectual virtues*) yang disampaikan Aristoteles, yaitu *episteme* (sains), *techne* (keahlian/seni), dan *phronesis* (etika). Untuk memahami rasionalitas manusia maka tidak cukup dengan hanya mengandalkan pendekatan sains dan keahlian. Namun, semestinya memasukkan pula unsur etika, yaitu dengan mempertimbangkan nilai (*value*) yang merujuk pada realitas praktis, pragmatis (tidak terikat aturan dan teori), variabel, dan tergantung pada konteks (*context-dependent*), berorientasi aksi, dan berbasis rasionalitas berorientasi nilai (*value-rationality*).<sup>69</sup>

Indonesia yang kaya akan keragaman tentunya sangat tepat mempertimbangkan *phronesis* dalam pendekatan studi-studi perilaku memilih. Faktor yang mendorong atau mem-

<sup>68</sup> Robert E. Lane dan David O. Sears, *Public Opinion*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1964), hlm. 74.

<sup>69</sup> B. Flyvbjerg, *Making Social Science Matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 57.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 122–123.

Tabel 8. Analisis Hasil-Hasil Riset Opini\*

Lembaga Riset Opini	Judul Berita	Kutipan Analisis	Waktu Rilis dan Sumber
LSI Lingkaran	LSI: Pemilu Sekarang, Suara Demokrat Anjlok	Ini sebagai akibat sentimen negatif mayoritas masyarakat terhadap keadaan politik nasional. "Ada indikasi sebagian besar partai mengalami kemunduran dukungan pemilih, dan sebagian mengalami penurunan," ujar peneliti LSI, Burhanudin Muhtadi, memaparkan hasil survei "Perubahan Politik 2014 Tren Sentimen Pemilih" di kantor LSI, Jakarta, Ahad, 19 Februari 2012.	19/02/2012 <a href="http://www.tempo.co">www.tempo.co</a> Diakses 30 Maret 2013
	Survei: Partai Islam Jeblok, Demokrat Ron-tok 2014 Apa yang Menyebabkan Perolehan Partai Islam Turun. Korupsi Hantam PD	LSI mencatat bahwa ada empat faktor yang memicu suramnya parpol Islam dan capres yang diusung pada Pemilu 2014. Faktor pertama adalah makin kentalnya fenomena "Islam Yes partai Islam No" .... Faktor kedua adalah pendanaan. Survei menunjukkan 85,2% publik menilai parpol Islam kurang modal dibandingkan partai nasionalis sehingga partai nasionalis lebih siap mendanai aktivitas dan <i>image building</i> partai... Faktor ketiga adalah munculnya tindakan anarki yang mengatasnamakan Islam. Tindakan kelompok tertentu itu diprediksi memunculkan "kecemasan kolektif" masyarakat. Selain itu, masyarakat juga cemas akan pemberlakuan syariat Islam jika partai Islam berkuasa. "Sekitar 46,1% publik percaya merosotnya partai Islam disebabkan oleh anarkisme yang mengatasnamakan Islam di Indonesia," kata Adjie. Faktor terakhir adalah semakin diakomodasinya kepentingan umat Muslim oleh parpol nasionalis, terlepas dari motif bersifat substantif ataupun simbolik. PDI-P, misalnya, membentuk Baitul Muslimin. Demokrat punya Majelis Dzikir SBY. Alat itu signifikan menarik simpati umat Islam. Survei menunjukkan 57,8% publik percaya bahwa partai nasionalis mengakomodasi kepentingan masyarakat Muslim.	14/10/2012 <a href="http://us.fokus.news.viva.co.id/">http://us.fokus.news.viva.co.id/</a> Diakses 30 Maret 2013
LSN	Survei LSN: PDI-P Terpopuler, Pemilih Gerindra Terloyal	"Popularitas parpol lama masih saling bersaing untuk populer di mata masyarakat. Namun partai baru, seperti Nasdem pelan-pelan popularitasnya terus naik," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S. Bakry ketika meluncurkan hasil survei di Jakarta, Senin. "Dari hasil analisis <i>cross-tabulation</i> yang dilakukan LSN, konstituen Partai Demokrat dan sejumlah partai Islam cenderung melakukan migrasi ke partai-partai yang dinilai publik sebagai partai bersih dan berideologi nasionalis," kata Umar.	15/10/2012 <a href="http://www.kompas.com">www.kompas.com</a> Diakses 30 Maret 2013
SMRC	Survei: Perolehan Suara Demokrat Merosot Tajam di 2014	Grace Natalie selaku pemapar hasil survei mengatakan, sekitar 20% dari pemilih Demokrat pada Pemilu 2009 belum memutuskan memilih partai apa. Kemudian sisanya memilih partai lain. Paling banyak, mereka tertarik beralih ke Partai Golkar. Dijelaskannya, peta kekuatan partai pada 2014 tentunya masih bisa berubah. Apalagi, jumlah pemilih mengambang atau <i>swing voter</i> berdasarkan hasil survei ini masih cukup besar, yakni 50%.	14/10/2012 <a href="http://nasional.kompas.com/">http://nasional.kompas.com/</a> Diakses 30 Maret 2013
JSI	JSI: Golkar berpotensi menangkan Pemilu 2014	"Dari survei yang kami lakukan terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia pada 17–21 Juli lalu menempatkan Partai Golkar di posisi teratas," kata Direktur Eksekutif JSI, Widdi Aswindi ketika memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Minggu. Menurut dia, tingkat popularitas Partai Golkar, yakni sebanyak 97,6% dan berada di posisi teratas, sedangkan di posisi berikutnya adalah PDI Perjuangan sebanyak 95,2%, Partai Demokrat 94,6%, Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 90,5%, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 88,4%, Partai Gerindra sebesar 88,3%.	12/08/2012 <a href="http://www.antaranews.com/">http://www.antaranews.com/</a> Diakses 30 Maret 2013

LSJ	Survei LSJ: Demokrat dan PKS Melorot Jelang Pemilu 2014	"Kisruh dalam tubuh Demokrat pasca pengambilan kendali Ketua Majelis Tinggi oleh SBY dari Anas Urbaningrum diapresiasi negatif oleh publik," kata peneliti senior LSJ Rendy Kurnia di Jakarta, Selasa (19/2/2013). Setali 3 uang dengan Demokrat, PKS juga mengalami masa yang sulit dengan turunnya elektabilitas jelang Pemilu 2014. "Ini terjadi setelah terbongkarnya kasus impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq," imbuh peneliti LSJ lainnya, Igor Dirgantara.	19/02/2013 <a href="http://news.liputan6.com/">http://news.liputan6.com/</a> Diakses 30 Maret 2013
Charta Politika	Hasil Survei, Hadapi Pemilu 2014 Memilih Makin Stagnan	Dia memaparkan keempat faktor stagnasi pemilih tersebut adalah pertama, tidak terjadinya perubahan kekuatan di papan atas, seperti tiga partai pemenang Pemilu 2009 masih mendominasi, yakni Golkar, Demokrat, dan PDI Perjuangan. Faktor kedua, menurut Toto, sapaan akrabnya, tidak munculnya <i>captive market</i> dan jaringan baru pemilih. "Sampai sekarang Golkar masih kuat di jaringan petani dan nelayan, sedangkan PDI Perjuangan di jaringan buruh," jelasnya. Ketiga, lanjutnya, rendahnya kedekatan secara psikologi antara partai ( <i>party ID</i> ) pemilih. "Rendahnya <i>party ID</i> menjadi salah satu pengaruh stagnasi pemilih karena hanya 14% responden yang mengaku dekat dengan partai politik," paparnya. Faktor yang keempat, Toto mengungkapkan, stagnasi pemilih itu bisa dilihat dari jumlah responden yang belum menentukan pilihan ( <i>undecided voters</i> ). " <i>Undecided voters</i> , masih menjadi 'pemenang' karena 34,4% responden masih belum menentukan pilihan menjelang Pemilu," tandasnya.	30/08/2012 <a href="http://politik.pelitaonline.com/">http://politik.pelitaonline.com/</a> Diakses 30 Maret 2013

\* Penulis menyadari kelemahan terhadap kutipan-kutipan yang diambil dari media *online*, yaitu kemungkinan tidak utuhnya para jurnalis mengutip pernyataan-pernyataan analisis perilaku memilih yang disampaikan para penyelenggara riset opini saat rilis media. Penulis semestinya merujuk pada dokumen rilis. Hanya saja, penelusuran secara *online* tidak berhasil mendapat dokumen lengkap laporan hasil-hasil riset opini yang memuat analisis atas temuan-temuan riset. Penulis berusaha mengurangi ketidakakuratan para jurnalis dalam menuliskan laporan rilis tersebut dengan cara mencantumkan dan menganalisis berdasarkan kutipan langsung dalam Tabel 8. Penjelasan ini sejalan dengan penjelasan penulis dalam catatan kaki no. 1

bentuk rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya akan relatif berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Meskipun bukan berarti tidak ada faktor-faktor yang relatif sama antarwilayah. Kembali pada perbedaan nilai elektabilitas yang dirilis lembaga-lembaga riset opini, perbedaan itu dimungkinkan karena tidak diakomodasinya aspek-aspek selain yang dianjurkan oleh paradigma sains dan mengandalkan teknik tertentu yang tidak sensitif pada konteks.

Sangat penting untuk dipertimbangkan satu aspek lain untuk melengkapi etika dalam studi-studi ilmu politik, khususnya dalam riset opini, yaitu dengan memasukkan unsur kekuasaan. Dari enam preposisi tentang *kekuasaan* yang dirangkum Flyvbjerg dari Foucault, Nietzsche, Weber, dan Dahl, satu yang relatif penting dipertimbangkan dalam analisis perbedaan nilai-nilai elektabilitas parpol, yaitu keterkaitan antara "pengetahuan dan kekuasaan, kebenaran dan kekuasaan serta rasionalitas dan kekuasaan.

Kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan memproduksi kekuasaan".<sup>70</sup>

Dengan kata lain, perbedaan nilai-nilai elektabilitas parpol berdasarkan hasil survei lembaga-lembaga riset opini yang saat ini mulai marak penting sekali dinilai dan dilihat dari hubungan antara produksi pengetahuan dan kontestasi kekuasaan. Hasil-hasil riset opini yang berbeda bukanlah fakta yang tanpa tendensi, melainkan bagian dari upaya-upaya yang mengarah pada tujuan-tujuan kekuasaan. Minimal untuk membangun opini yang menguntungkan satu pihak yang berkompetisi dan meruntuhkan opini kepada pihak yang lainnya.

Hanya saja, penulis mengakui bahwa makalah ini tidak mampu menjelaskan secara konkret penggunaan kekuasaan dalam praktik dan publikasi hasil-hasil riset opini menjelang Pemilu 2014. Hal ini membutuhkan studi

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

lapangan (*fieldwork*) yang intensif dan langsung berhubungan dengan lembaga-lembaga riset opini dan bila memungkinkan dengan penyandang dana atau pihak-pihak yang secara langsung berkepentingan dengan hasil-hasil riset opini.

## Penutup

Banyak dan intensifnya rilis hasil-hasil riset opini menjelang Pemilu 2014 menarik perhatian media massa untuk mempublikasikannya. Bagi pihak-pihak yang membaca hasil-hasil riset itu secara sekilas, tentunya tidak akan menimbulkan rasa ingin tahu. Audiens cukup mengetahui parpol mana yang diprediksi unggul, meningkat nilai elektabilitasnya, dan bahkan yang diperkirakan akan turun daya tariknya di mata publik. Namun, rasa keingintahuan akan muncul dengan kuat apabila membandingkan nilai-nilai elektabilitas partai politik yang dirilis lembaga-lembaga riset opini. Terdapat disparitas nilai elektabilitas yang cukup besar walaupun waktu pelaksanaan jajak pendapat relatif tidak terlalu jauh perbedaannya.

Upaya pertama untuk menjawab pertanyaan itu dilakukan melalui penelusuran metodologi yang digunakan oleh lembaga-lembaga survei. Hasilnya, metodologi yang digunakan berpendekatan seragam, yaitu mengandalkan perspektif positivisme dan bersandar pada asumsi-asumsi baku mulai penetapan sampel hingga analisis. Kesamaan ini justru menyisakan pertanyaan, kenapa persamaan metodologi menghasilkan nilai-nilai elektabilitas yang berbeda?

Kemudian, upaya kedua yang dilakukan dengan melihat profil dari lembaga-lembaga riset opini yang merilis hasilnya kepada publik. Sayangnya, fakta-fakta normatif profil lembaga-lembaga riset opini yang bisa diakses secara terbuka tidak cukup untuk menjawab perbedaan itu. Profil lembaga hanya menunjukkan karakter normatif institusi yang berbeda dalam bentuk lembaga, yaitu lembaga yang berorientasi mencari profit dan nonprofit. Karenanya, analisis profil lembaga tidak cukup kuat untuk membangun argumen perbedaan nilai-nilai elektabilitas parpol menjelang Pemilu 2014 yang dirilis setiap lembaga riset opini.

Usaha berikutnya, mencoba mencari penjelasan dari angka-angka *swing voters* yang

muncul dalam setiap kali hasil survei. Konsistensi antara perbandingan nilai elektabilitas dan angka *swing voters* memberikan sedikit jawaban. Kecilnya nilai elektabilitas tiga parpol besar (Partai Golkar, PDI-P, dan Partai Demokrat) disebabkan oleh besarnya angka *swing voters*. Begitu pula dengan nilai *swing voters* yang lebih kecil berbanding lurus dengan angka elektabilitas yang lebih besar dari tiga partai tersebut. Hasil studi Ufen memberikan tambahan tentang fakta peningkatan *swing voters* sebagai bagian dari munculnya gejala keterputusan hubungan antara parpol dan pemilih (*dealignment*).<sup>71</sup> Hanya saja, jawaban itu masih memunculkan pertanyaan terkait fakta begitu dinamisnya pemilih di Indonesia. Mengapa riset opini yang digelar hampir bersamaan menghasilkan disparitas *swing voters* yang besar pula?

Harapan untuk menemukan jawaban atas keingintahuan akibat perbedaan nilai-nilai elektabilitas parpol hasil rilis lembaga-lembaga riset opini menjelang Pemilu 2014 mengarah pada titik terang. Adopsi pendekatan kritis dalam mengkaji hasil-hasil riset opini cukup membantu untuk menjawab pertanyaan itu. Ditambah dengan membaca pengalaman lembaga-lembaga riset opini di Amerika Serikat yang ternyata lebih dulu mempertontonkan perbedaan hasil-hasil riset opini. Kategorisasi “kubu akademisi” dan “kubu komersil” di antara lembaga-lembaga riset opini yang ditawarkan Mietzner cukup membantu menjelaskan perbedaan nilai-nilai elektabilitas parpol.<sup>72</sup> Intinya, setiap lembaga riset opini memiliki perbedaan kepentingan yang memungkinkan untuk menghasilkan disparitas angka-angka elektabilitas partai politik yang cukup besar meski penyelenggaraan survei dilakukan dalam waktu yang relatif bersamaan. Dengan kata lain, praktik-praktik survei partisan memungkinkan munculnya perbedaan nilai-nilai elektabilitas hasil survei tersebut.

Upaya terakhir melalui penelusuran atas analisis hasil survei dan penggunaan pendekatan metodologis dalam penyelenggaraan riset opini memperkuat jawaban. Asumsi lembaga-lembaga riset opini yang menganggap pemilih bersikap rasional dan mengerti persoalan-persoalan

<sup>71</sup> A. Ufen, *op. cit.*, hlm. 35–36.

<sup>72</sup> M. Mietzner, *op. cit.*, hlm. 117.

politik terbaru terlalu menyimplicasikan realitas pemilih di Indonesia karena rasionalitas yang dipraktikkan sebenarnya bersifat praktis atau jawaban yang disampaikan dalam setiap kali survei bersifat spontan tanpa pertimbangan matang. Oleh karena itu, perbedaan nilai-nilai elektabilitas antarpapol bisa terjadi karena pertimbangan memberikan jawaban yang bersifat praktis. Secara metodologis, pendekatan saintifik dalam pelaksanaan riset opini yang mengadopsi hukum-hukum riset sains telah memarginalkan pertimbangan etika. Pengabaian terhadap konteks, nilai, dan realitas praksis di masyarakat dan pertimbangan keterkaitan antara produksi pengetahuan dan kekuasaan dalam penyelenggaraan riset-riset opini menambah kejelasan atas perbedaan nilai-nilai elektabilitas parpol menjelang Pemilu 2014.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ananta, Aris *et al.*, 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Aspinall, E. dan M. Mietzner. 2010. *Problems of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Caplan, Bryan. 2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.
- Chambers, R. 1997. *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Flyvbjerg, B. 2001. *Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed Again*. Cambridge: Cambridge University Press.

Glynn, Carrol J. (Eds.). 1999. *Public Opinion*. Colorado: Westview Press.

Lane, Robert E. dan David O. Sears. 1964. *Public Opinion*. New Jersey: Prentice-Hall.

Moore, David W. 2008. *The Opinion Makers: An Insider Exposes the Truth Behind the Polls*. Boston: Beacon Press.

Qodari, M. 2010. "The Professionalization of Politics: The Growing Role of Polling Organization and Political Consultants", dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (Eds.). *Problems of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

### Jurnal

- Downs, A. 1957. "An Economic Theory of Political Action in a Democracy", *Journal of Political Economy*, 65 (2): 135–150.
- Jacobs, Lawrence R. dan Robert Y. Shapiro. 2005. "Polling Politics, Media, and Election Campaigns", *Public Opinion Quarterly*, 5 (Special Issue): 635–641.
- Lipari, L. 1999. "Polling as Ritual", *Journal of Communication*, Winter: 83–102.
- Mayer, William G. 2007. "The Swing Voter in American Presidential Elections", *American Political Research*, 35(3): 358–388.
- Mietzner, M. 2009. "Political Opinion Polling in Post-Authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation?", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 165(1): 95–126.
- Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia", *South East Asia Research*, 16 (1): 5–41.